Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

LAPORAN KEGIATAN

Trainers Convention Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Bogor, 25 s.d. 28 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara *offline* atau luring di Bigland Hotel Int'l & Convention Hall. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui peningkatan kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran..

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan. Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para calon *trainers* Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat lebih meningkatkan kualitasnya..

Akhir kata, demikian laporan kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **iii**

A. PENDAHULUAN **1**

A.1. Umum **1**

A.2. Tujuan **3**

B. PELAKSANAAN KEGIATAN **4**

B.1. Nama Kegiatan **4**

B.2. Waktu dan Tempat **4**

B.3. Peserta Kegiatan **4**

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat **4**

B.5. Uraian Kegiatan **4**

B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan **4**

B.5.2. Acara Pembukaan **5**

B.5.3. Penyampaian Materi **5**

B.5.4. Acara Penutupan **6**

C. HAMBATAN **6**

D. PEMBIAYAAN **6**

E. PENUTUP **7**

F. LAMPIRAN **8**

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Laporan Keuangan**
3. **Jadwal Kegiatan**
4. **Materi**
5. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
6. **Surat Tugas**

TRAINERS CONVENTION
DALAM RANGKA PERSIAPAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PELAKSANAAN KEGIATAN

Trainers Convention
Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Januari 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) pengkhianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan "jiwa" dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku penyelenggara bimbingan teknis ini perlu mengembangkan keseluruhan komponen pendidikan mulai dari

substansi materi, kurikulum, narasumber, fasilitator, bahan ajar, metodologi dan strategi pembelajaran, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sehingga tujuan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pencari keadilan mengenai hukum acara, mekanisme, tahapan, jadwal, dan kemampuan penyusunan permohonan, keterangan pihak terkait, keterangan termohon, keterangan bawaslu, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi pemanfaatannya dapat semakin maksimal.

Atas dasar pemikiran di atas, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. *Trainers Convention* diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas narasumber, fasilitator, substansi materi, kurikulum, bahan ajar, metodologi, dan strategi pembelajaran di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Selain itu, adanya kesamaan visi dan misi antara Pusdik Pancasila dan Konstitusi dengan para calon pengajar dalam mencapai sasaran pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sehingga kompetensi dan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi semakin meningkat.

A.2 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui peningkatan kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

"*Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024".

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Januari 2023 secara luring atau *offline* di Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 125 orang yang terdiri dari calon narasumber dan moderator/fasilitator pada kegiatan Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan pancasila dan Konstitusi.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

Peserta mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

1) Tas;
2) Tumbler;
3) *USB flashdisk pen laser pointer*;
4) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
5) E-sertifikat.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* atau luring di Bigland Hotel Int'l & Convention Hall. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dengan mengisi daftar hadir melalui scan barcode yang telah disediakan oleh panitia.

B.5.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 16.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporannya. Adapun susunan acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars MK, laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, ceramah kunci dan pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri dari Hakim Mahkamah Konstitusi, *Managing Director AIDA Consultant*, dan beberapa ahli di internal Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	**Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD**	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
2.	**Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024**	1. KPU RI: Andi Krisna, S.Sos., M.M. 2. Bawaslu RI: Totok Hariyono SH
3.	***Public Speaking***	**Managing Director AIDA Consultant** Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP
4.	**Penyampaian Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU**	1. Imam Margono 2. Nanang Subekti
5.	**Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**	1. YM Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. 2. YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

NO.	MATERI	NARASUMBER
6.	**Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD**	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
7.	**Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU**	1. Plt Sekretaris Jenderal MK 2. Panitera MK
8.	**Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek**	Fasilitator

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Sesi diskusi atau tanya jawab ini dipandu oleh moderator. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung di Grand Ballroom hotel kepada narasumber. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi narasumber telah disiapkan oleh panitia berupa *slide powerpoint.* Materi narasumber juga diberikan kepada peserta melalui WA group.

B.5.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 08.00 WIB pada hari Sabtu, 28 Januari 2023 oleh Plt Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

C. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu penyelenggaraan kegiatan TC kurang berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak semua peserta mengikuti seluruh sesi materi. Beberapa peserta harus meninggalkan hotel karena bertugas untuk mendukung persidangan Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC. 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 689.913.373 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 01 Maret 2023

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Elisabeth	**Nanang Subekti**
NIP. 19640906 198603 2 004	NIP. 19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk476440851230228044330

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Panitera Mahkamah Konstitusi, Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Penyampaian materi Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 oleh KPU RI dan Bawaslu RI.



Penyampaian materi *Public Speaking* oleh Bapak Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP.



Penyampaian materi Penyampaian Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU oleh Bapak Imam Margono dan Bapak Nanang Subekti.



Penyampaian materi Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh YM Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. dan YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD oleh YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. dan materi Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU oleh Bapak Muhidin dan Bapak Heru Setiawan.



Penyampaian materi Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek oleh fasilitator.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Sekretaris Jenderal MK dan dihadiri oleh Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi serta seluruh peserta.



Foto bersama peserta kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

LAPORAN KEUANGAN

Trainers Convention bagi Calon Narasumber Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Muhidin dkk 24 orang	Biaya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi Persiapandi Pusdik tanggal 12-13 Januari 2023.	Rp 14,848,739
2	Muhidin dkk 123 orang	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan tanggal 25-28 Januari 2023	Rp 142,087,065
3	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Persiapan di Pusdik tanggal 12-13 Januari 2023.	Rp 9,030,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapandi Pusdik tanggal 12-13 Januari 2023.	Rp 4,981,680
5	CV Telaga Jati Abadi	Biaya Cetak dan Pasang Backdrop dengan raknga ukuran 360 cm x 700cm	Rp 9,435,000
6	Totok Hariyono dkk	Honor narasumber	Rp 6,200,000
7	Anwar Usman dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narsum	Rp 3,680,000
8	PT Buana Botani Elok	Pembayaran Belanja Pengadaan Paket meeting, Akomodasi dan Konsumsi	Rp 356,870,000
9	Pretty Litle Corkcicle	Biaya Pengadaan Seminar kit Panitia	Rp 9,724,000
10	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Seminar Kit Peserta	Rp 123,146,175
11	PT Aida Infini Maksima	Biaya pelaksanaan Trainer Development : Public Speaking	Rp 9,910,714
TOTAL			689,913,373

JADWAL KEGIATAN *TRAINERS CONVENTION*

Hari, Tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Januari 2023
Lokasi : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA	***Dress Code* / Pakaian: Batik**			
Rabu, 25 Januari 2023	14.00 – 15.00 WIB	**Registrasi Peserta dan *Check in***	Penyelenggara	Grand Ballroom Lantai PL
	15.00 – 16.30 WIB	Istirahat		
	16.30 – 18.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi**	Grand Ballroom Lantai PL
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	

	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi II:** **Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD Tahun 2024**	Narasumber: **1. YM Dr. Suhartoyo** **2. YM Prof. Saldi Isra** Moderator: **Pan M. Faiz**	Grand Ballroom Lantai PL
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA	***Dress Code* / Pakaian: Bebas Rapi**			
Kamis, **26 Januari 2023**	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan		Restoran Lantai PL
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi III:** **Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024**	Narasumber: **1. KPU** **2. Bawaslu** Moderator: **Ardiansyah Salim**	Grand Ballroom Lantai PL
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi IV:** ***Public Speaking***	**Managing Director AIDA Consultant** Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP	Grand Ballroom Lantai PL
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	

	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi V:** **Penyampaian Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **1. Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi** **2. Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan**	Grand Ballroom Lantai PL
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*		
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi VII:** **Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**	Narasumber: **1. YM Prof. Arief Hidayat** **2. YM Prof. M. Guntur Hamzah** Moderator: **PM II - Dr. Wiryanto**	Grand Ballroom Lantai PL
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA	***Dress Code* / Pakaian: Bebas Rapi**			
Jumat, **27 Januari 2023**	06.30 – 07.30 WIB	Sarapan		Restoran Lantai PL
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi VIII:** **Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Tahun 2024**	Narasumber: **YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh** Moderator: **PM I - Triyono Edy Budhiarto**	Grand Ballroom Lantai PL
	09.30 – 09.45 WIB	*Coffee Break*		

	09.45 – 11.45 WIB	**Sesi IX:** **Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **1. Panitera** **2. Plt. Sekretaris Jenderal**	Grand Ballroom Lantai PL
	11.45 – 13.30 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi X:** **Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek**	Narasumber: **1. Mardian Wibowo** **2. Syukri Asy'ari** **3. M. Mahrus Ali**	Grand Ballroom Lantai PL
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*		
	16.00 – 17.00 WIB	**Sesi XI:** **Lanjutan Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek**	Narasumber: **1. Mardian Wibowo** **2. Syukri Asy'ari** **3. M. Mahrus Ali**	Grand Ballroom Lantai PL
	17.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT	***Dress Code* / Pakaian: Bebas Rapi**			
Sabtu, **28 Januari 2023**	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan		
	08.00 – 10.00 WIB	**Penutupan** 1. Laporan Plt. Kapusdik 2. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Doa	**Plt. Sekretaris Jenderal** **Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi**	Grand Ballroom Lantai PL

	10.00 – 12.00 WIB	***Check out***		



INDEKS KERAWANAN PEMILU

PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LATAR BELAKANG

Amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) butir a:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) butir a:

“Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu”





DEFINISI DAN TUJUAN

DEFINISI KERAWANAN PEMILU:
Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.

TUJUAN:

1. Memetakan Potensi Kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
2. Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan.
3. Menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan.

KONSTRUKSI IKP

KONSTRUKSI IKP terdiri dari:

4 DIMENSI
12 SUBDIMENSI
61 INDIKATOR



KONTEKS SOSIAL POLITIK	•	3 Subdimensi	-	16 Indikator
PENYELENGGARAAN PEMILU	•	5 Subdimensi	-	24 Indikator
KONTESTASI	•	2 Subdimensi	-	15 Indikator
PARTISIPASI	•	2 Subdimensi	-	6 Indikator

DIMENSI DAN SUB DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Keamanan
- Otoritas Penyelenggara Pemilu
- Otoritas Penyelenggara Negara



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Hak Memilih,
- Pelaksanaan Kampanye,
- Pelaksanaan Pemungutan Suara,
- Ajudikasi dan Keberatan Pemilu,
- Pengawasan Pemilu



KONTESTASI

- Hak Dipilih,
- Kampanye Calon



PARTISIPASI

- Partisipasi Pemilih,
- Partisipasi Kelompok Masyarakat

METODOLOGI

IKP dikonstruksi dari 61 indikator. Setiap indikator mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai setiap indikator dihitung dengan menjumlahkan *event* kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian.

Indikator penyusun dimensi diaggregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi. Skor akhir IKP untuk setiap daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dari dimensi-dimensi.

Kategorisasi untuk skor IKP dan skor per dimensi dihitung dengan membagi skor menjadi tiga bagian besar dengan *cut-off* satu simpangan baku dari nilai rerata.

- Skor dianggap rendah jika skor berada di bawah satu simpangan baku dari nilai rerata nasional variable.
- Skor dianggap sedang jika skor berada antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rerata nasional.
- Skor dianggap tinggi jika skor berada di atas satu simpangan baku dari nilai rerata nasional.

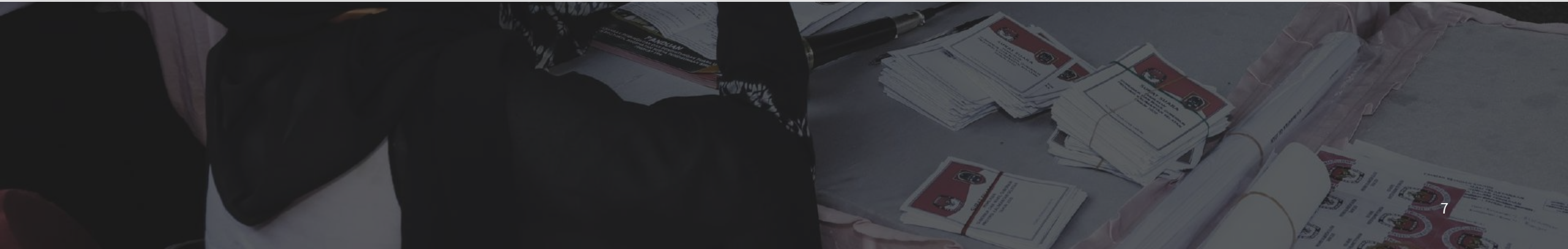




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)

TINGKAT PROVINSI



TENTANG IKP PROVINSI

Ada dua analisa IKP Provinsi: berdasarkan hasil input data dari Bawaslu provinsi dan berdasarkan hasil agregat penghitungan kabupaten/kota

Berdasarkan hasil input data Bawaslu Provinsi merupakan data yang memang menunjukkan proses pemilu/pilkada di tingkat provinsi serta kewenangan yang dimiliki

Berdasarkan hasil agregat penghitungan kab/kota merupakan hasil yang diperoleh dari data input yang berasal dari kab/kota

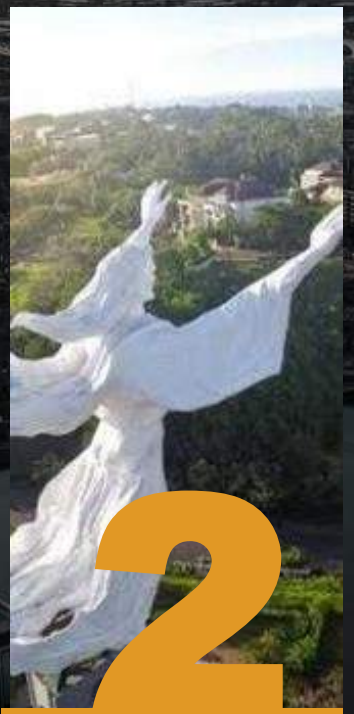
TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN TINGGI)

RAWAN TINGGI :

5 Provinsi (15 Persen)



1 DKI Jakarta (88,95)



2 Sulawesi Utara (87,48)



3 Maluku Utara (84,86)



4 Jawa Barat (77,04)



5 Kalimantan Timur (77,04)

TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN SEDANG)

RAWAN SEDANG :

21 Provinsi (62 Persen)

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	BANTEN	66.53
2	LAMPUNG	64.61
3	RIAU	62.59
4	PAPUA	57.27
5	NUSA TENGGARA TIMUR	56.75
6	SUMATERA UTARA	55.43
7	MALUKU	53.69
8	PAPUA BARAT	53.48
9	KALIMANTAN SELATAN	53.35
10	SULAWESI TENGAH	52.90
11	BALI	52.75

NO	PROVINSI	SKOR IKP
12	GORONTALO	45.44
13	SULAWESI BARAT	43.44
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	43.02
15	KEPULAUAN RIAU	40.33
16	SUMATERA BARAT	39.68
17	SULAWESI TENGGARA	38.32
18	ACEH	38.06
19	SUMATERA SELATAN	35.07
20	JAWA TENGAH	34.83
21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	29.89

TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN RENDAH)

RAWAN RENDAH :

8 Provinsi (24 Persen)

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	KALIMANTAN UTARA	20.36
2	KALIMANTAN TENGAH	18.77
3	JAWA TIMUR	14.74
4	KALIMANTAN BARAT	12.69
5	JAMBI	12.03
6	NUSA TENGGARA BARAT	11.09
7	SULAWESI SELATAN	10.20
8	BENGKULU	3.79

KERAWANAN PROVINSI PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Tinggi : 5 Provinsi (14.71%)
  Sedang : 22 Provinsi (64.71%)
- Rendah : 7 Provinsi (20.59%)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
  Sedang : 20 Provinsi (58.82%)
- Rendah : 8 Provinsi (23.53%)



KONTESTASI

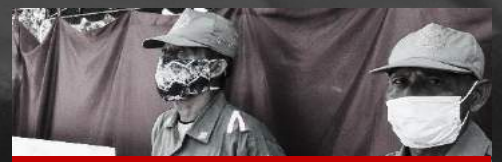
- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
- Sedang : 19 Provinsi (55.88%)
- Rendah : 9 Provinsi (26.47%)



PARTISIPASI

- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
  Sedang : 28 Provinsi (82.35%)
- Rendah : 0 Provinsi (0 %)

10 PROVINSI RAWAN TINGGI PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Maluku Utara (100)
- Sulawesi Utara (89,58)
- Papua (80,53)
- DKI Jakarta (78,27)
- Yogyakarta (75,87)
- Jawa Barat (74.91)
- Kalimantan Timur (72.70)
- Sumatera Utara (72.61)
- Papua Barat (72.33)
- Kalimantan Selatan (66.96)



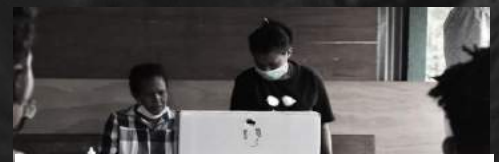
PENYELENGGARAAN PEMILU

- Kalimantan Timur (100)
- Sumatera Utara (94,29)
- DKI Jakarta (92,36)
- Jawa Tengah (91,67)
- Sulawesi Utara (91,60)
- Banten (89,43)
- Maluku Utara (86.48)
- Jawa barat (83.38)
- Lampung (81.13)
- Sulawesi Tenggara (80.48)



KONTESTASI

- Maluku Utara (100)
- DKI Jakarta (96,09)
- Lampung (89,30)
- Jawa Barat (83,71)
- Bangka Belitung (79,10)
- Sulawesi Utara (73,96)
- Bali (71.32)
- Nusa Tenggara Timur (68.96)
- Gorontalo (65.65)
- Riau (62.96)



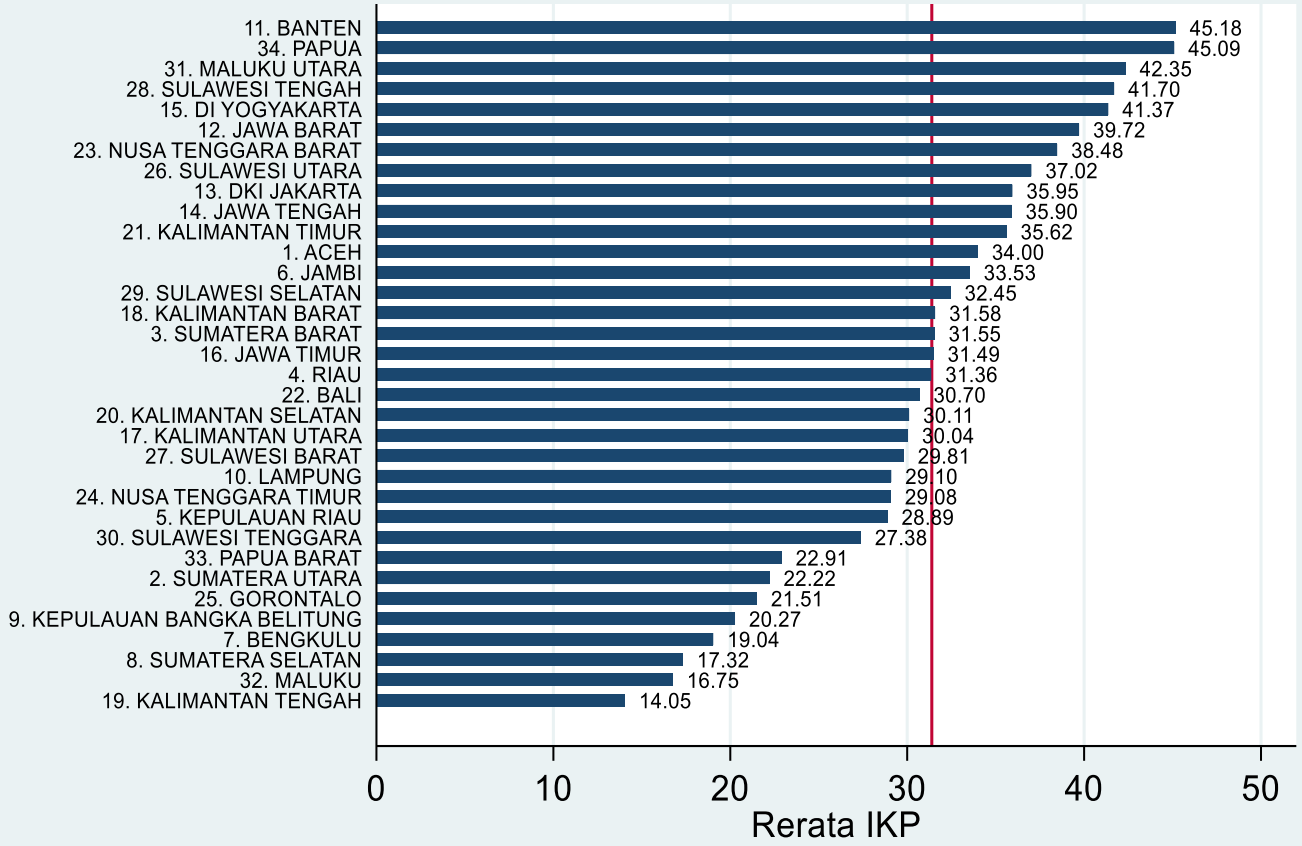
PARTISIPASI

- Sulawesi Utara (100)
- DKI Jakarta (87,01)
- Yogyakarta (87,01)
- Kepulauan Riau (87,01)
- Sulawesi Tengah (87,01)
- Papua (64,72)
- Jawa barat (42.07)
- Kalimantan Timur (30.92)

IKP PROVINSI TERTINGGI

BERDASARKAN AGREGASI KAB/KOTA

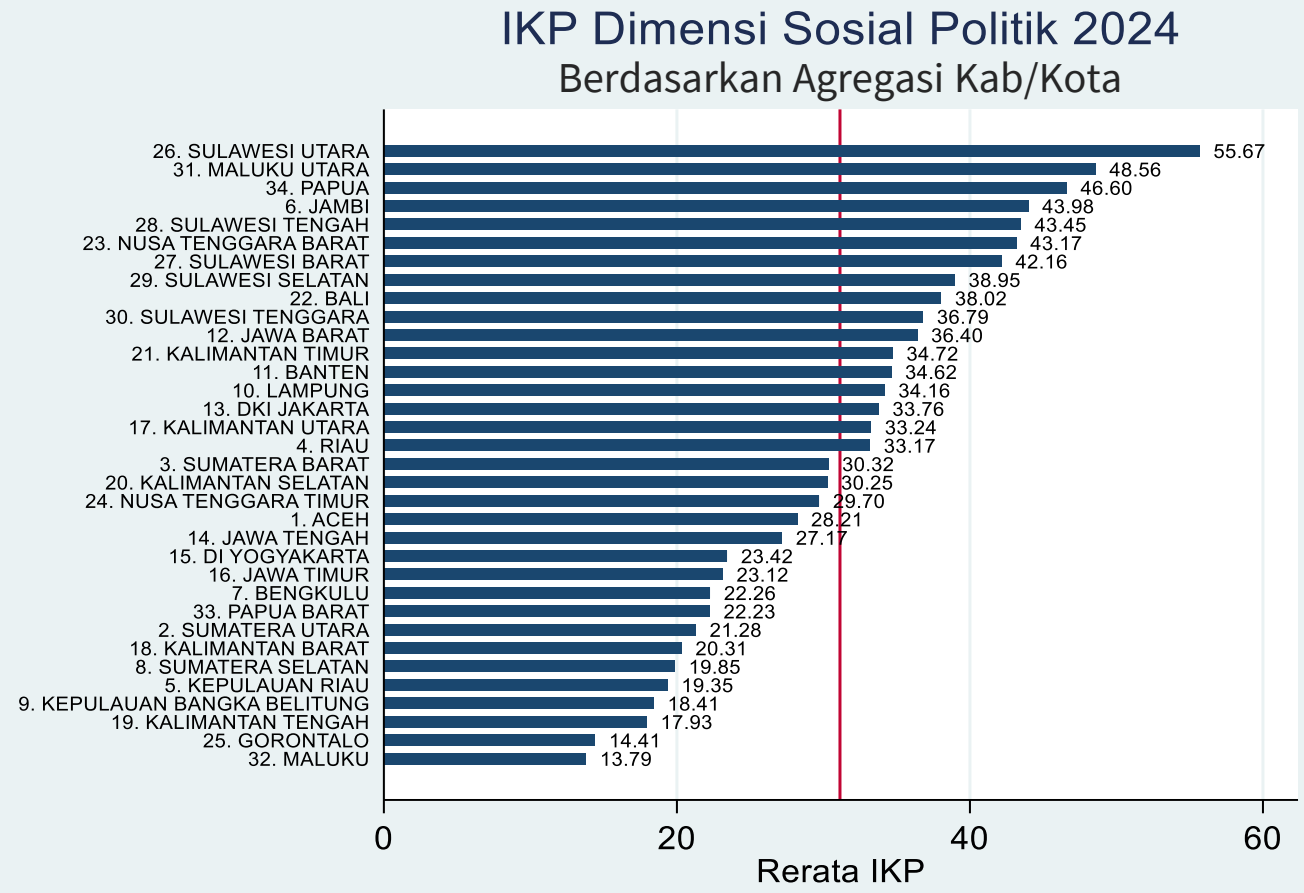
1. Banten
2. Papua
3. Maluku Utara
4. Sulawesi Tengah
5. D.I. Yogyakarta
6. Jawa Barat
7. Nusa Tenggara Barat
8. Sulawesi Utara
9. DKI Jakarta
10. Jawa Tengah



IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI SOSIAL POLITIK

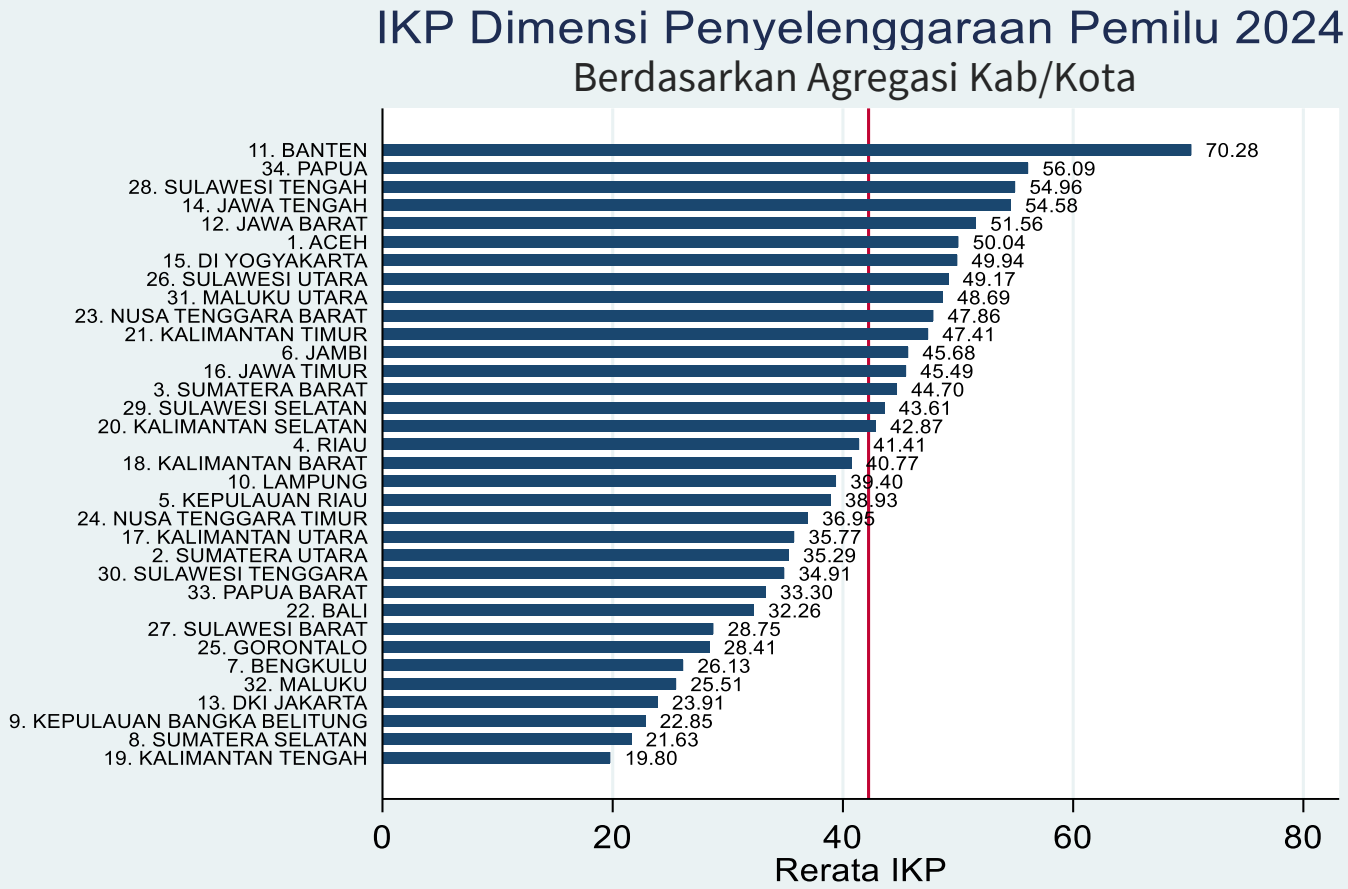
1. Sulawesi Utara
2. Maluku Utara
3. Papua
4. Jambi
5. Sulawesi Tengah
6. Nusa Tenggara Barat
7. Sulawesi Barat
8. Sulawesi Selatan
9. Bali
10. Sulawesi Tenggara



IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU

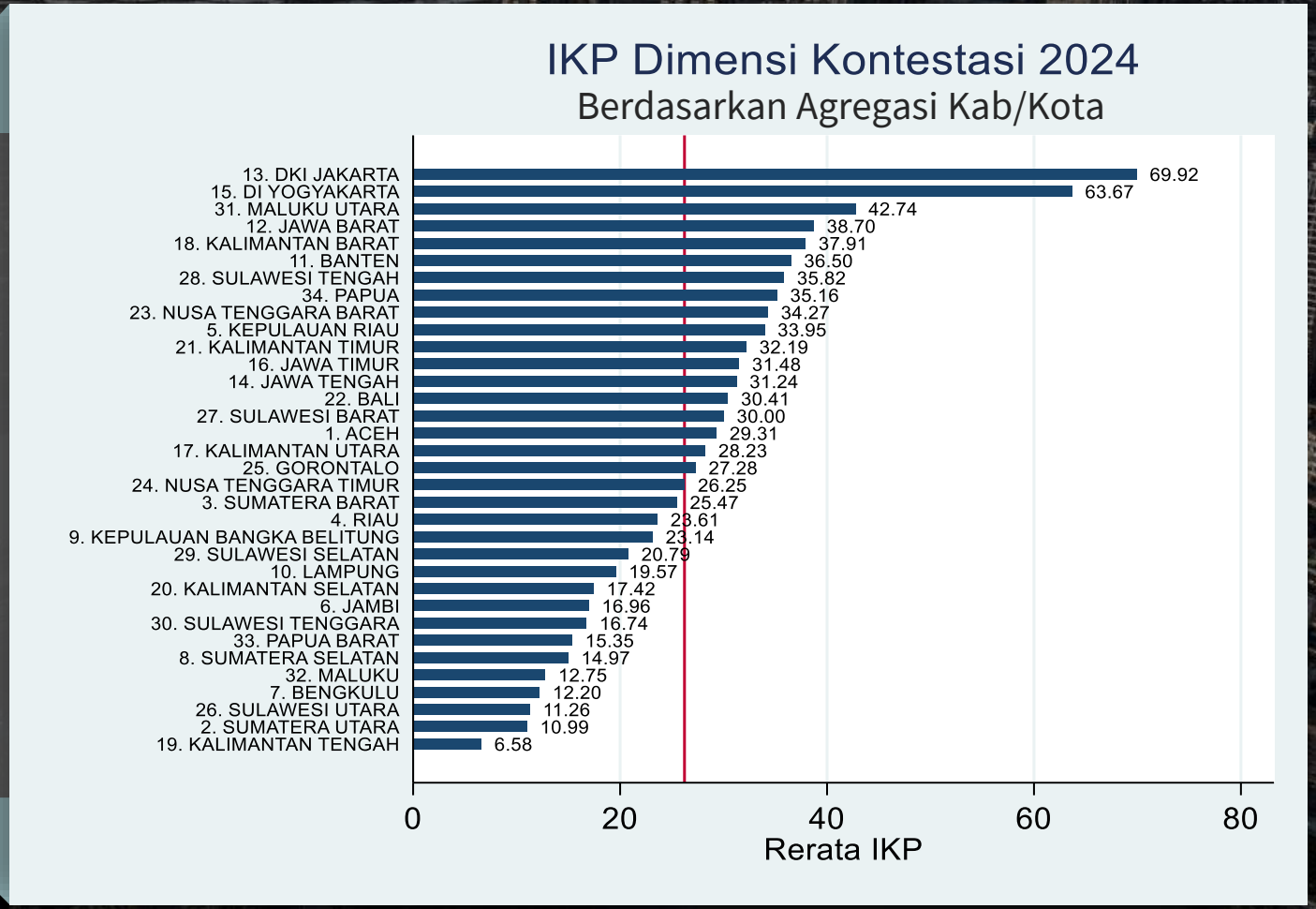
1. Banten
2. Papua
3. Sulawesi Tengah
4. Jawa Tengah
5. Jawa Barat
6. Aceh
7. DI. Yogyakarta
8. Sulawesi Utara
9. Maluku Utara
10. Nusa Tenggara Barat



IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI KONTESTASI

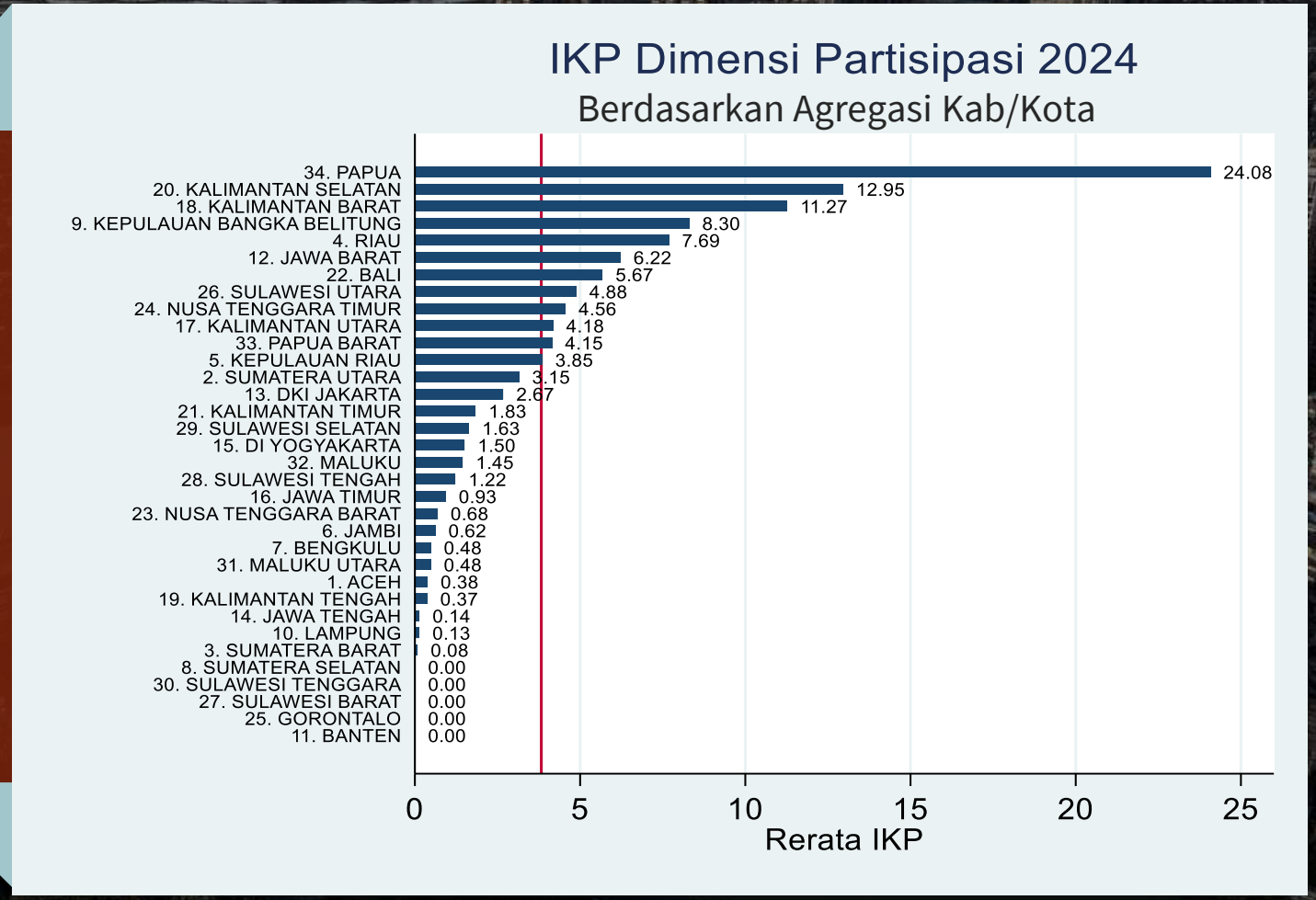
1. DKI Jakarta
2. DI. Yogyakarta
3. Maluku Utara
4. Jawa Barat
5. Kalimantan Barat
6. Banten
7. Sulawesi Tengah
8. Papua
9. Nusa Tenggara Barat
10. Kepulauan Riau



IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI PARTISIPASI

1. Papua
2. Kalimantan Selatan
3. Kalimantan Barat
4. Kep. Bangka Belitung
5. Riau
6. Jawa Barat
7. Bali
8. Sulawesi Utara
9. Nusa Tenggara Timur
10. Kalimantan Utara





INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TINGKAT IKP
KABUPATEN/KOTA

Rawan Tinggi :
85 Kab/kota

(16.54%)

Rawan Sedang:
349 Kab/kota

(67.90%)

Rawan Rendah:
80 Kab/kota

(15.56%)

KERAWANAN KAB/KOTA PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- **Tinggi :76** Kab/kota (14.79%)
- **Sedang : 370** Kab/kota (71.98%)
- **Rendah : 68** Kab/kota (13.23%)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- **Tinggi : 84** Kab/kota (16.34%)
- **Sedang : 339** Kab/kota (65.95%)
- **Rendah : 91** Kab/kota (17.70%)



KONTESTASI

- **Tinggi : 95** Kab/kota (18.48%)
- **Sedang : 419** Kab/kota (81.52%)
- **Rendah : 0** Kab/kota (0%)



PARTISIPASI

- **Tinggi : 30** Kab/kota (5.84%)
- **Sedang : 484** Kab/kota (94.16%)
- **Rendah : 0** Kab/kota (0%)

KABUPATEN/KOTA
RAWAN TINGGI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	KAB. INTAN JAYA	100
2	KAB. JAYAWIJAYA	100
3	KAB. BANDUNG	91.59
4	KAB. YALIMO	86.66
5	KAB. MAPPI	82.13
6	KOTA BANJARBARU	80.14
7	KAB. JAYAPURA	78.05
8	KAB. PANDEGLANG	77.74
9	KAB. LABUHANBATU UTARA	76.29
10	KAB. MALAKA	76.03
11	KOTA TERNATE	75.30
12	KOTA SEMARANG	73.26
13	KAB. TOLIKARA	72.51
14	KAB. SUKOHARJO	70.20
15	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	67.72
16	KAB. LOMBOK TIMUR	67.57
17	KAB. MAJALENGKA	67.14
18	KAB. PURWOREJO	67.11
19	KAB. SIMEULUE	67.07
20	KAB. KOTABARU	65.52
21	KAB. TASIKMALAYA	65.42
22	KOTA JAKARTA TIMUR	65.14
23	KAB. KEPULAUAN YAPEN	64.93
24	KAB. CIREBON	64.79
25	KAB. SLEMAN	64.56
26	KAB. HALMAHERA TENGAH	64.19
27	KAB. MALANG	64.01
28	KAB. AGAM	63.96
29	KAB. KEDIRI	63.40
30	KAB. PUNCAK	63.23
31	KAB. BULUKUMBA	63.19
32	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	63.03
33	KOTA BANDAR LAMPUNG	62.90
34	KAB. PIDIE	61.80
35	KAB. LOMBOK TENGAH	61.23
36	KAB. BATANG HARI	61.18
37	KAB. MIMIKA	61.18
38	KAB. FAKFAK	61.04
39	KAB. BANDUNG BARAT	59.93
40	KAB. MAMBERAMO TENGAH	59.68
41	KAB. NIAS SELATAN	59.65
42	KAB. NDUGA	59.55
43	KAB. TEMANGGUNG	59.05
44	KAB. LEBAK	58.78
45	KOTA SUNGAI PENUH	58.67
46	KAB. WONOSOBO	58.35
47	KAB. ACEH SELATAN	57.75
48	KAB. SUMBA TIMUR	57.52
49	KAB. KERINCI	57.42
50	KOTA JAYAPURA	56.64
51	KAB. SIGI	56.38
52	KAB. NABIRE	56.28
53	KAB. TUBAN	56.21
54	KAB. BOJONEGORO	55.76
55	KOTA BEKASI	55.48
56	KAB. MAMUJU	54.90
57	KOTA PAREPARE	54.69
58	KAB. LAMPUNG TENGAH	54.65
59	KAB. SARMI	54.34
60	KAB. MAGELANG	54.25
61	KAB. PASANGKAYU	54.21
62	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	54.04
63	KOTA SERANG	53.32
64	KAB. KENDAL	53.25
65	KAB. BANYUASIN	53.19
66	KAB. NAGAN RAYA	53.03
67	KAB. SEKADAU	52.78
68	KAB. WAKATOBI	52.73
69	KAB. BANGGAI	52.66
70	KAB. PASAMAN BARAT	52.66
71	KAB. KETAPANG	52.27
72	KAB. SAMPANG	52.19
73	KAB. ALOR	51.83
74	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	51.75
75	KAB. KUTAI KARTANEGARA	51.49
76	KOTA TASIKMALAYA	51.28
77	KAB. PACITAN	51.17
78	KAB. KUNINGAN	51.10
79	KAB. KONAWE SELATAN	50.68
80	KAB. CIANJUR	50.65
81	KOTA KOTAMOBAGU	50.65
82	KAB. KUTAI BARAT	50.33
83	KAB. MUNA	49.91
84	KAB. ASMAT	49.47
85	KAB. JENEPONTO	49.38



PENGARUH KERAWANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DALAM IKP





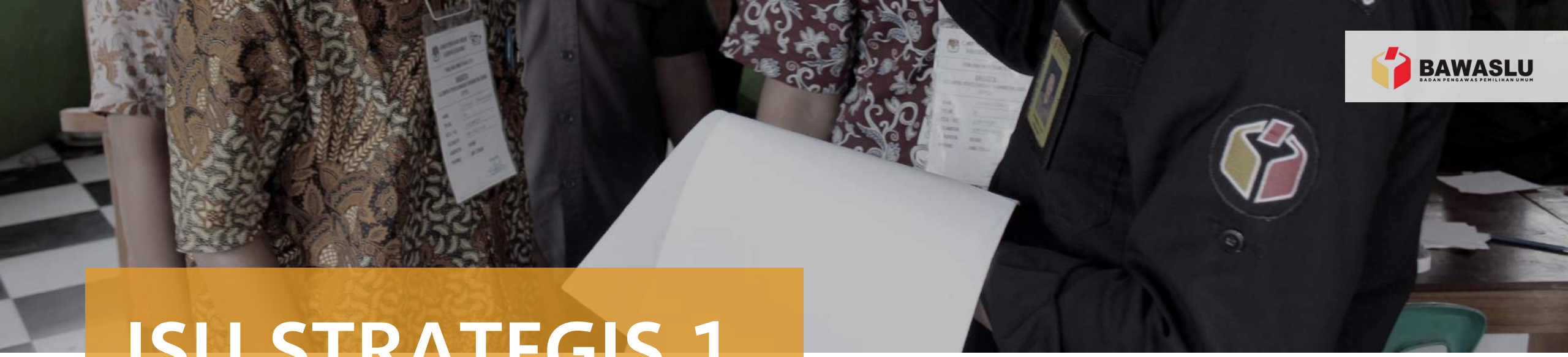
PENGARUH KERAWANAN DALAM IKP

PROVINSI

- **Penyelenggaraan Pemilu** adalah dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27 diikuti oleh **Konteks Sosial Politik** dengan skor 46,55 kemudian **Kontestasi** dengan skor 40,75 dan **Partisipasi Politik** dengan skor 17, 23.

KABUPATEN/KOTA

- **Penyelenggaraan Pemilu** juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 42,22 diikuti oleh **Konteks Sosial Politik** dengan skor 31,13 kemudian **Kontestasi** dengan skor 26,22 dan **Partisipasi Politik** dengan skor 3,83.



ISU STRATEGIS 1

1. **Netralitas Penyelenggara Pemilu:** polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu kedepan.

2. **Pelaksanaan Tahapan di provinsi baru**. Perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara Pemilu.



ISU STRATEGIS 2

3. **Potensi Polarisasi Masyarakat**. Perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.

4. **Mitigasi dampak penggunaan media sosial**. Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.

5. **Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih**. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TERIMA KASIH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



SISTEM PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024

TOTOK HARIYONO

DEMOKRASI

Ada banyak varian terkait dengan demokrasi, sebagaimana dijelaskan oleh *founding fathers* kita Bung Karno yang meletakkan sosio sebelum demokrasi dan disebut sebagai sosio demokrasi dimana demokrasi yang berdiri diatas dua kaki di masyarakat dalam politik dan ekonomi. Diperkuat melalui sosio nasionalisme yakni nasionalisme masyarakat, nasionalisme yang mencari selamatnya seluruh masyarakat, jadilah demokrasi Indonesia tumbuh dengan bentuknya sendiri, gayanya sendiri. "Di samping elemen-elemen yang sama, yaitu elemen-elemen universal dalam azas-azas demokrasi pada umumnya, maka demokrasi Indonesia masih harus menemukan elemen-elemen khusus, elemen-elemen spesifik yang mendasar jiwa dan irama kehidupan politik bangsa Indonesia sendiri. Adakah elemen-elemen khusus itu? Ada! Ambillah misalnya elemen khusus Indonesia "gotong-royong" dan elemen musyawarat dalam suasana "kekeluargaan". Elemen-elemen ini tidak ada pada bangsa-bangsa di dunia Barat. Elemen-elemen ini adalah warisan daripada tradisi jiwa Bangsa Indonesia turun-temurun berabad-abad

PEMILU

Secara *original intent* Bung Karno menjelaskan demokrasi adalah alat, alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang sempurna. Pemilihan umum adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu.

Berdasarkan konstitusi dalam UUD NKRI tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) dimana Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

PENYELENGGARA PEMILU SECARA KONSTITUSIONAL

Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Menurut Mahkamah Konstitusi, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.**

Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.

(vide putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010)



DESAIN PENGAWASAN PEMILU

Idea menjelaskan kontruksi pengawasan secara umum:

"*Election observation has two main purposes: to assess the election against agreed or accepted standards, and to provide a presence and visibility which will provide fewer opportunities for irregularities and deter fraud. The first purpose can be achieved with a limited number of observers, since conclusions may be drawn from samples. The second objective is likely to require a much larger presence*".

Ada 2 tujuan utama dari pengawas pemilu :

Pertama, untuk menilai pelaksanaan pemilu berdasarkan standar yang telah disepakati atau diterima.

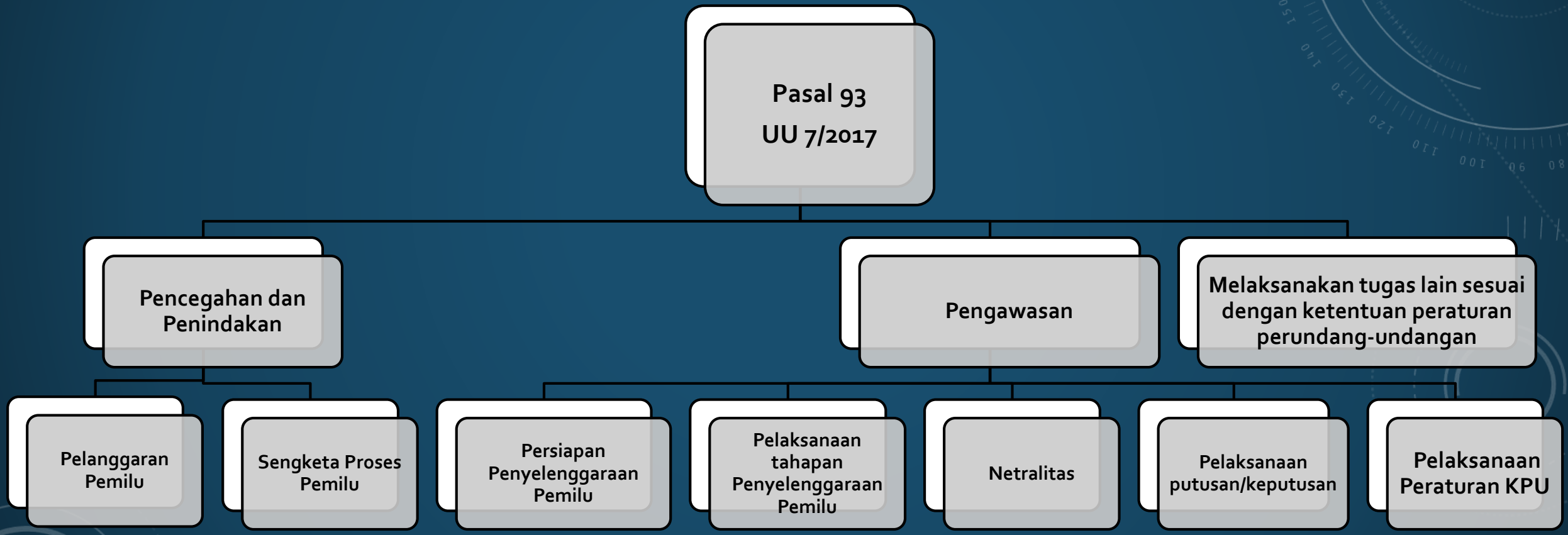
Kedua, untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan mencegah kecurangan.

Terhadap tujuan pertama dapat melibatkan pengawas yang sedikit dengan menggunakan sampel, namun untuk tujuan kedua membutuhkan pengawas yang banyak serta kuat.

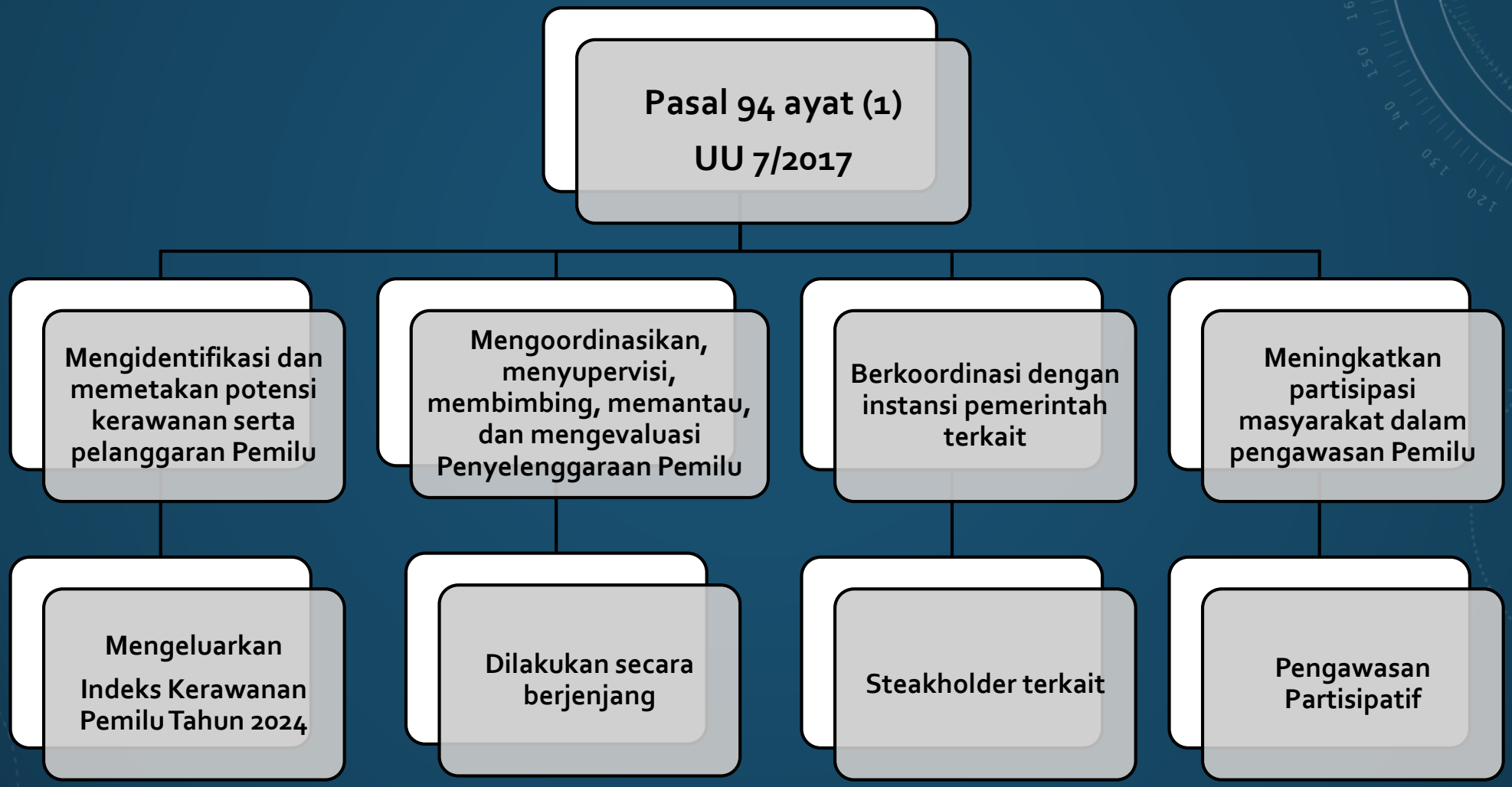
Desain pengawas pemilu Indonesia saat ini ingin mencapai 2 tujuan utama tersebut, artinya Pengawas Pemilu di Indonesia harus didesain dalam jumlah banyak dan juga kuat sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.



KONSTRUKSI TUGAS BAWASLU



POLA PENCEGAHAN



POLA PENINDAKAN

Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) UU 7/2017

Penindakan pelanggaran

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;

c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu,dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan

d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

(*Jo* Perbawaslu 7/2022, Perbawaslu 8/2022, Perbawaslu 31/2018)

Sengketa Proses Pemilu

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(*Jo* Perbawaslu 9/2022)

POLA PENGAWASAN

Pasal 93

UU 7/2017

***(Jo* Perbawaslu 5/2022)**

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. penetapan Peserta Pemilu;
4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. penetapan hasil Pemilu;

Netralitas ASN, TNI, Polri

Putusan / Keputusan

1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Pelaksanaan Peraturan KPU

GOTONG ROYONG DALAM PENCEGAHAN, PENINDAKAN SERTA PENGAWASAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024

- Merubah Paradigma bukan seberapa banyak Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang dilakukan melainkan seberapa maksimal pencegahan yang dilakukan
- Menyusun instrumen pengawasan serta Pemetaan Kerawanan pada Setiap Tahapan Pemilu
- Mengefektifkan Sosialiasi dan Koordinasi kepada sesama penyelenggara Pemilu, seluruh partai politik dan peserta pemilu serta memaksimalkan pengawasan partisipatif
- Melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan semua Tahapan Pemilu

KAITANNYA DENGAN PHPU



- **Hasil Pencegahan berupa:**

Surat Edaran, Surat Himbauan dan Surat lain merupakan bagian penting Bawaslu sebagai pemberi keterangan sudah melakukan Langkah-Langkah preventif.

- **Hasil Penindakan berupa:**

Penyelasaian Sengketa Proses Pemilu: Putusan Sepakat Mediasi atau Putusan Adjudikasi terhadap objek penyelesaian sengketa berupa Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU.

Penanganan Pelanggaran : Temuan atau Laporan, Putusan terhadap pelanggaran administrasi, Pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu dan/ atau hasil kajian berupa penerusan terkait pelanggaran undang-undangan lainnya.

Hasil penindakan menjadi bagian penting, bahwa Bawaslu sebagai pemberi keterangan melakukan upaya penegakan hukum dalam tahapan-tahapan sudah diselesaikan oleh Bawaslu yang sangat mungkin menjadi bagian dari dalil-dalil dalam PHPU.

Hasil Pengawasan berupa:

Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A .
Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:
a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
b. Pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

Formulir model A merupakan bagian sangat penting kaitannya Bawaslu sebagai pemeberi keterangan, hal ini dikarenakan dalam Formulir model A tersebut segala pristiwa mulai dari Data Pengawas, Kegiatan Pengawasan, Uraian hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran dan informasi potensi sengketa proses pemilu dicatat dan dilaporkan secara berjenjang.

Akibat logisnya Formulir model A hasil pengawasan menjadi penerang pristiwa dalam semua kejadian setiap tahapan pemilu, hal ini memudahkan baik itu Majelis Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon dan Pihak lainnya dalam PHPU.

Indeks Kerawanan Pemilu dan Kaitannya dengan PHPU

Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024

Subdimensi :

1. Konteks sosial dan politik,
2. Penyelenggaraan pemilu,
3. Kontestasi dan
4. Partisipasi

Daerah Rawan

(Tinggi, Sedang dan Rendah)

Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

Potensi menjadi dalil dalam PHPU

Intervensi Bawaslu dengan memaksimalkan Pola Pencegahan, Pola Penindakan dan Pola Pengawasan

TANTANGAN PEMILU TAHUN 2024

Beban Kerja Pengawas Pemilu dengan jumlah SDM yang kurang

(Efektifkan model pengawasan dan memaksimalkan pengawas partisipatif)

Pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada serentak pada tahun 2024

(peningkatan kapasitas pengawas dan penguatan regulasi)

Politik uang, Polititisasi SARA, Netralitas (ASN, TNI dan Polri)

(memaksimalkan pola pencegahan dan mengefektifkan pola penindakan)

Akurasi DPT

(penguatan koordinasi dengan KPU dan Kemendagri)

Akses Data, Akses Jaringan Teknologi Informasi, dan Kendala Geografis

(memperkuat system informasi dalam pengawasan dan postur anggaran sesuai kebutuhan)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TERIMA KASIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024

Disampaikan dalam Kegiatan Training of Convention Narasumber & Fasilitator Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi

Andi Krisna
(Kepala Biro AHPS)

www.kpu.go.id kpu_ri KPU Republik Indonesia @KPU_ID KPU RI

Bogor, 26 Januari 2023

Pendahuluan

Pemilu Serentak Tahun 2019

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu 2019

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Tujuan Pemilu Serentak

Pertama

Menegaskan & mendorong efektivitas pemerintahan Presidensial

Kedua

Menciptakan efisiensi penyelenggaraan Pemilu & menekan besaran anggaran penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Serentak

Pemilu 2019

Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD

+

Pemilu Presiden & Wakil Presiden

Pemilu 2024

Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden

+

Pemilihan Kepala Daerah (pada tahun yang sama)

Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pasal 2
(Asas-Asas Pemilu)

- Langsung
- Umum
- Bebas
- Rahasia
- Jujur
- Adil

Pasal 3
(Prinsip Penyelenggaraan Pemilu)

- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Berkepastian Hukum
- Tertib
- Terbuka
- Proporsional
- Profesional
- Akuntabel
- Efektif
- Efisien

Penyelenggara Pemilu
Pasal 1 angka 7
UU No. 7 Tahun 2017







Tahapan Pemilu ☞ Pasal 167 UU No. 7 Tahun 2017

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
d. penetapan Peserta Pemilu;
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
g. masa Kampanye Pemilu;
h. Masa Tenang;
i. pemungutan dan penghitungan suara;
j. penetapan hasil Pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Evaluasi Pemilu Tahun 2019

KPU Melayani

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019

1 Partai Kebangkitan Bangsa	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4 Partai Golongan Karya	5 Partai NasDem
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7 Partai Berkarya	8 Partai Keadilan Sejahtera	9 Partai Persatuan Indonesia	10 Partai Persatuan Pembangunan
11 Partai Solidaritas Indonesia	12 Partai Amanat Nasional	13 Partai Hati Nurani Rakyat	14 Partai Demokrat	15 Partai Aceh
16 Partai SIRA	17 Partai Daerah Aceh	18 Partai Nanggroe Aceh	19 Partai Bulan Bintang	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

AYO MEMILIH! PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

Peserta Pemilu 2019



Pemutakhiran Data Pemilih

Isu Fundamental

01

Rezim
"Kewarganegaraan"
atau
"Kependudukan"

02

Stelsel aktif
atau
pasif

03

Standar syarat
sebagai Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih

Problem Regulasi
(8 Parameter Hukum ala Lon Fuller)

- Kontradiksi antar UU (UU Pemilu vs UU Adminduk), Kontradiksi antar PKPU, kontradiksi PKPU dengan UU, Kontradiksi PKPU dengan Bawaslu
- Bentuk Produk Hukum belum mengikat semua pihak, belum tepat, dan belum ada pedoman pembuatan produk hukum KPU
- Norma hukum tidak ajeg,sering berubah baik di Undang-Undang, PKPU, maupun Surat Edaran
- Norma aturan tidak jelas dan tidak komprehensif (missal mekanisme penyusunan data kependudukan & DP4 oleh Pemerintah belum ada, mekanisme tarlih di wilayah perbatasan, pemilih nomaden, dll)
- Norma hukum (UU dan PKPU) belum proyektif (norma tentang pemutakhiran data pemilih bagi pemilih rentan administrasi kependudukan).
- Terdapat norma hukum yang meng-eksklusi (tidak berlaku umum), antara lain terkait WNI yang “tidak diakui secara administrasi” oleh pemerintah karena tinggal di lahan sengketa/tanah negara, dst.
- Pengaturan terkait perlindungan data pribadi dimana penetapan informasi data pemilih sebagai informasi dikecualikan menimbulkan konflik dengan Pengawas Pemilu.
- Norma peraturan yang tidak implementatif dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan (Penerapan KTP-el sebagai syarat memilih).

Pemutakhiran Data Pemilih

Evaluasi Sistem Informasi

Perlu ada regulasi di level UU sebagai payung hukum untuk penggunaan sistem informasi agar aplikasi yang dikembangkan KPU tidak rawan digugat.

Perlu ada sinkronisasi/pemetaan terhadap UU yang menangani data dan sistem informasi (UU ITE, UU PDP, Perpres).

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih & Partisipasi Masy

Tujuan

1. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi yang kemudian bertujuan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan di bilik suara, maupun pada setiap tahapan pemilihan.
3. Meyakinkan masyarakat bahwa mereka berdaya, bukan hanya menjadi obyek dalam pemilihan, tetapi menjadi subyek.
4. Pendidikan pemilih perlu disertai dengan pendidikan civic sebelum dan setelah pemilihan.
5. Mendorong keterbukaan informasi

Tantangan

1. Tingkat partisipasi pemilih tidak serta merta menjadi keberhasilan penyelenggara. Ada tantangan partisipasi dalam hal lain, misalnya terlibat badan adhoc, atau mengawal proses pemilu atau pemilihan.
2. Ada pengaruh dari eksternal yang bisa mengintervensi pilihan masyarakat (vote buying, hoax)
3. Penetrasi internet akan makin pesat, sehingga juga berpotensi membuat penyelenggaraan pemilu berhadapan dengan disinformasi dan post-truth
4. Desain sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disiapkan KPU terkadang belum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah
5. Dampak dari pandemi Covid-19 patut dipertimbangkan masih berdampak pada sebagian tahapan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Kampanye

Tujuan

Membuka ruang diskusi dua arah terkait visi dan misi program kandidat dalam sebuah pemilihan

Tantangan

1. Kampanye pada Pemilihan Serentak 2020 berlangsung di tengah pandemic Covid-19. Perlu dipertimbangkan kemungkinan dampak pandemi atau post-pandemi terhadap kampanye di Pemilu dan Pemilihan 2024.
2. Berkaca pada Pemilihan 2020, transformasi kampanye digital masih belum dipilih pasangan calon. Kandidat masih mengutamakan kampanye fisik.
3. Jaringan internet di sejumlah daerah menjadi kendala. Juga persoalan kuota internet bagi penduduk dengan ekonomi menengah ke bawah.
4. Alat peraga kampanye konvensional difasilitasi penyelenggara, tetapi terkadang tidak digunakan oleh kandidat. Padahal, sudah mengeluarkan biaya besar.
5. Persoalan durasi kampanye yang cukup panjang, berbiaya besar dan bisa menyebabkan adanya polarisasi di masyarakat

Badan Ad Hoc & Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

Tujuan

1. Memastikan terpilihnya badan adhoc yang berintegritas dan profesional.
2. Memastikan badan adhoc dalam kondisi kesehatan prima sebelum dan setelah berlangsungnya pemilihan.
3. Pengawasan internal oleh KPU Kabupaten/kota mampu meminimalisasi potensi persoalan pelanggaran kode etik

Tantangan

1. Pada Pemilu 2019, banyak jatuh korban penyelenggara adhoc karena beban kerja tinggi. Patut jadi pelajaran pada saat Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Terlebih ada irisan di antara dua pemilihan itu.
2. Tidak mudah mendapat “pasokan” calon anggota badan Adhoc. Pertama, karena administrasi untuk seleksi Badan Adhoc yang rumit dan persyaratan juga tidak mudah. Misalnya, syarat usia dan kemudian periodisasi maksimal 2 kali.
3. Honorarium untuk KPPS relatif rendah, tidak sebanding dengan beban kerja. Ada disparitas honorarium antara KPPS di pemilu dan pemilihan. Perlu di antisipasi di Pemilu dan Pemilihan 2024.
4. Belum ada aplikasi untuk basis data, proses rekrutmen, monitoring kinerja, maupun memantau pelanggaran kode etik yang dilakukan badan adhoc. SIPP tidak mampu memenuhi kebutuha itu.
5. Belum adanya juknis yang mengatur tentang penanganan kode etik badan adhoc, termasuk kebutuhan persidangan cepat kode etik badan adhoc.
6. Tidak adanya penganggaran untuk penanganan kode etik badan adhoc

EVALUASI

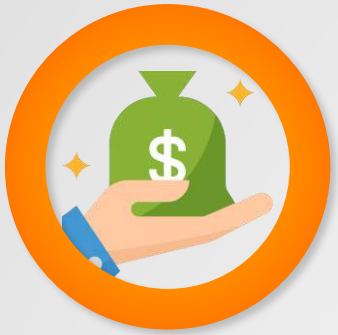
01 DANA KAMPANYE

02 TUNGSURA, REKAPITULASI, PENETAPAN HASIL



03 PELANGGARAN ADMINSTRASI DAN SENGKETA HASIL PEMILU

DANA KAMPANYE



1. Menyelaraskan Ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, dalam isu Dana Kampanye, bahwa penggunaan dana kampanye wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016.

2. Peraturan KPU harus mengatur dan mendesain aturan dana kampanye sesuai dengan standar akuntansi penggunaan dana kampanye dan wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi keuangan

3. Tata Kelola:
   a. Mengatur Ulang Tata Kelola Pelaporan Dana Kampanye dalam Peraturan KPU
   b. Mengatur ulang terkait dengan pelaporan rekening awal dan saldo akhir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
   c. Sistem Informasi yang terintegrasi

TUNGSURA, REKAPITULASI, PENETAPAN HASIL

Regulasi

1. PKPU tentang Pungut Hitung, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil yang mengurangi beban dan mempermudah kerja Badan Adhoc serta meningkatkan akurasi hasil Pemilu melalui penyederhanaan formulir, pengoptimalan pemanfaatan IT untuk mencegah penyalahgunaan hak pilih, penyerahan Salinan model C-Hasil melalui Salinan digital dan/atau melalui PPS yang dilegalisir
2. Perlunya legalitas penggunaan IT untuk pungut hitung suara, rekapitulasi dan penetapan hasil melalui Undang Undang Pemilu dan Pemilihan
3. Perlu percepatan penyusunan dan pengesahan PKPU sehingga tidak menghambat pelaksanaan tahapan dengan memperhitungkan keharusan konsultasi PKPU ke DPR dan Pemerintah, serta harmonisasi PKPU di Kemenkumham yang membutuhkan waktu lama
4. Penyelarasan dan penegasan aturan terkait dengan persyaratan dilaksanakannya PSU, PSS, PSL dan pihak yang berwenang untuk menentukan PSU, PSS, dan PSL pada Pemilu dan Pemilihan
5. Sinkronisasi atas perbedaan pengaturan antara PKPU Tahapan dan PKPU Tungsura terkait waktu penetapan hasil Pemilu atau penetapan pasangan calon terpilih
6. Pengaturan ulang terkait jumlah KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS serta jumlah PPS dan PPK yang mengacu pada indikator jumlah TPS
7. Regulasi yang mengatur wilayah wilayah yang menjadi kantong Pemilih terkait dengan ketersediaan logistik surat suara (ex: Kota Pelajar)
8. Ketentuan tentang pembagian jadwal kedatangan Pemilih pada TPS perlu dipertahankan pada Pemilu dan Pemilihan mendatang
9. Sinkronisasi PKPU Pemilu dan Pemilihan terkait TPS Permanen dengan jumlah Pemilih yang sama pada Pemilu dan Pemilihan

TUNGSURA, REKAPITULASI, PENETAPAN HASIL



Tata Kelola

1. Orientasi Bimtek lebih kepada Simulasi, waktu lebih Panjang dan memiliki standar materi Bimtek yang sudah diterapkan
2. Materi Bimtek menggunakan teknologi dan konten-konten kreatif
3. Memperkuat infrastruktur IT dan optimalisasi kualitas untuk rekapitulasi suara (Sirekap) dan Situng
4. Membangun mekanisme yang terlembaga yang mampu meminimalisir risiko pemilih ganda

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTASI

Regulasi

1. Perlu ada aturan di UU yang membuka ruang bagi KPU untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan Bawaslu tentang sengketa proses dan pelanggaran administrasi serta putusan TUN

2. Perlu ada aturan di Undang-Undang terkait batasan yuridiksi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi, (misal Batasan kewenangan Bawaslu terhadap kasus sama yang sedang berlangsung di MK).

Tata Kelola

1. Diperlukan Produk Hukum (PKPU atau Juknis) menghadapi sengketa hasil Pemilu beserta draft dokumen yang diperlukan secara lengkap sehingga KPU kab/kota memiliki panduan untuk menyiapkan dokumen tersebut

2. Dalam menyusun Peraturan KPU dan Bawaslu perlu dibahas lebih awal dengan sesama penyelenggara Pemilu untuk menyamakan persepsi terhadap isu-isu krusial sebelum uji publik atau Rapat Dengar Pendapat di DPR, supaya ada kesepahaman dan tafsir yang sama atas suatu produk hukum

3. Perlu adanya pertemuan tripartit secara berkala untuk membangun konsolidasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP



PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PEMILIHAN

1. Perlu ada Peraturan KPU yang mengatur tentang standar penyusunan kode alat bukti sesuai dengan aturan MK

2. Aturan mengenai penambahan durasi untuk menyiapkan jawaban tertulis dan penyiapan alat bukti

3. Perlu adanya aturan dalam Peraturan KPU untuk menyederhanakan alat bukti C-Hasil-KWK yang terlalu besar untuk di salin menjadi alat bukti ke MK



Sistem Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Pasal 168 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu



1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
2. Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
3. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Tantangan Pemilu Tahun 2024

Pemilu Tahun 2024



1. **Pemilu 2019 & 2024 memiliki kesamaan.**
2. **Pemilu & Pemilihan mendatang jadi kompleks, karena diselenggarakan di tahun yang sama (2024).**
3. **Modal yang membuat kita optimis pengalaman menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan melaksanakan Pilkada 2020 dalam situasi Pandemi Covid-19.**



Jadwal Pemungutan Suara Pemilu & Pemilihan Tahun 2024

Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD serta Pemilu Presiden & Wapres
14 Februari 2024

Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
27 November 2024





Peserta Pemilu & Pemilihan Tahun 2024



PARTAI POLITIK



CAPRES - CAWAPRES



PERSEORANGAN DPD



CAGUB - CAWAGUB



CABUP - CAWABUP



CAWALKOT - CAWAWALKOT

Komitmen & Arah Kebijakan KPU dlm Mewujudkan Integritas Pemilu



SEMANGAT

Visi KPU:
"Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Perspektif Pemngku Kepentingan

- Meningkatnya kualitas pelayanan
- Meningkatnya pendidikan pemilih
- sumber daya manusia berkompeten
- **Terwujudnya Pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas**
- Regulasi yang tegas, progresif & partisipatif
- Menguatnya tata kelola penyelenggaraan Pemilu
- Akuratnya data pemilih
- Menguatnya kedudukan organisasi

KOMITMEN

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga

Perumusan Kebijakan	Pelayanan dan Diseminasi	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi
Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pemilu	Menetapkan standar pelayanan publik	Mengoptimalkann pengawasan melekat pada setiap level manajemen
Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan	Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih	Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja organisasi
Mendorong pengembangan inovasi kebijakan	Memperkuat fungsi humas dan media center	
	Memperkuat fungsi hukum organisasi	
	Mendesiminasikan kebijakan penyelenggaran Pemilu	
	Mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih	

KOMITMEN

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kelembagaan	sumber daya	Kepemimpinan	Rencana & Dana	Infrastruktur & IT
Membangun organisasi yang profesional, efektif dan efisien	Mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten, berintegritas dan	Mengembangkan sinergitas antara Pimpinan KPU dan Setjen	Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi	Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi

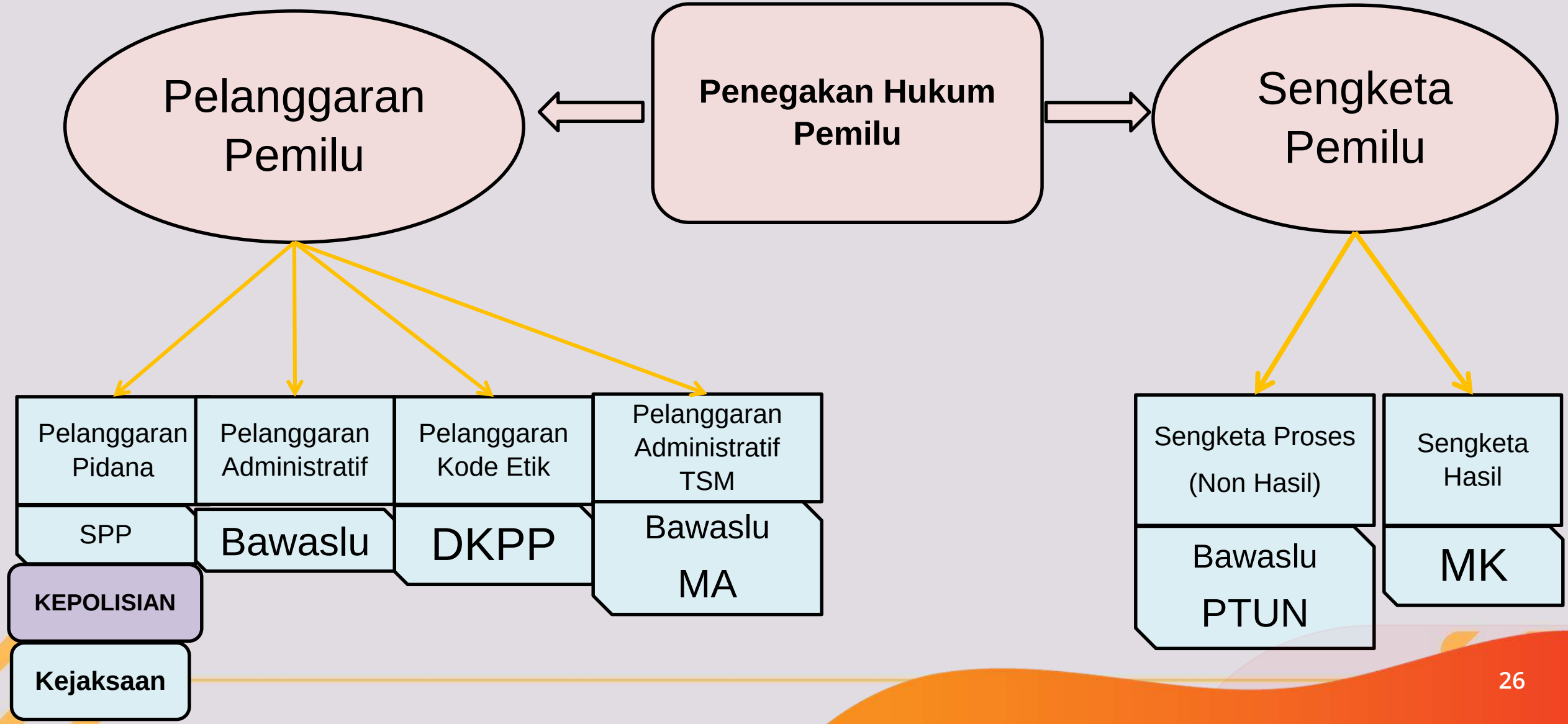
KOMITMEN

Tahapan Pemilu Tahun 2024

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	
	a. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	14 Juni 2022 s/d 14 Juni 2024
	b. Penyusunan PKPU	14 Juni 2022 s/d 14 Des 2023
2.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	14 Okt 2022 s/d 21 Jun 2023
3.	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	29 Jul 2022 s/d 13 Des 2022
4.	Penetapan Peserta Pemilu	14 Des 2022
5.	Penetapan jumlah kursi & penetapan Dapil	14 Okt 2022 s/d 9 Feb 2023
6.	Pencalonan	
	a. Anggota DPD	6 Des 2022 s/d 25 Nov 2023
	b. Anggota DPR & DPRD	24 Apr 2023 s/d 25 Nov 2023
	c. Presiden & Wakil Presiden	19 Okt 2023 s/d 25 Nov 2023
7.	Masa Kampanye Pemilu	28 Nov 2023 s/d 10 Feb 2024
8.	Masa Tenang	11 Feb 2024 s/d 13 Feb 2024
9.	Pemungutan & penghitungan suara	
	a. Pemungutan suara	14 Feb 2024
	b. Penghitungan suara	14 Feb 2024 s/d 15 Feb 2024
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Feb 2024 s/d 20 Mar 2024
10.	Penetapan hasil Pemilu (disesuaikan dengan terdapat atau tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu)	

Pelanggaran Pemilu

Penegakan Hukum Pemilu (Electoral Law Enforcemen)



Jumlah Perkara yg dihadapi KPU per Januari 2024

Laporan Pelanggaran Adm. Pemilu di Bawaslu RI Pada Masa Pendaftaran & Verifikasi (17 Laporan)

1. Partai Berkarya (2 Laporan)
2. Partai Pelita (2 Laporan)
3. Partai IBU
4. PAKAR
5. PKR
6. PBI
7. Partai Kongres
8. Partai Pandu Bangsa
9. Partai Pemersatu Bangsa
10. PANDAI
11. PERKASA
12. Partai Masyumi
13. Partai Kedaulatan
14. Partai Reformasi
15. Partai Republik Satu



Jumlah Perkara yg dihadapi KPU per Januari 2024

Permohonan Sengketa Proses Pemilu (SPPU) di Bawaslu RI Pada Masa Pendaftaran & Verifikasi (6 Laporan)

1. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
2. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
3. Partai Republik
4. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
5. Partai Republiku Indonesia
6. Partai Ummat



Jumlah Perkara yg dihadapi KPU per Januari 2024

Gugatan di PTUN Jakarta (25 Gugatan)

1. Partai IBU (2 Gugatan)
2. Partai Masyumi (3 Gugatan)
3. PKR (2 Gugatan)
4. PANDAI (2 Gugatan)
5. Partai Republik
6. Parsindo (3 Gugatan)
7. Partai Republiku Ind. (2 Gugatan)
8. Prima (2 Gugatan)
9. DPN PKP
10. Partai Republik
11. DPP Partai Berkarya
12. PERKASA



Tantangan Pemilu Serentak 2024

- ✓ Penataan & Pembagian Dapil untuk Pemilu Anggota DPR & DPRD Provinsi pasca Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022
- ✓ Metode pencalonan, pemberian suara, & penetapan pemenang ⇨ Penerapan Aplikasi Silon & Sirekap
- ✓ Penataan organisasi ⇨ pola rekrutmen Anggota KPUD agar menghasilkan SDM yg mumpuni & berintegritas;

- ✓ Logistik & distribusi ⇨ melakukan pengadaan dengan transparan sesuai kebutuhan logistik & distribusi tepat jumlah dan waktu;
- ✓ Pemantau ⇨ Pola rekrutment Pemantau yg berintegritas
- ✓ Pemilu di tengah Pandemi;
- ✓ Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yg tepat sasaran sesuai demografi Pemilih dan kategori Pemilih Pemula, Generasi Milenial, & Gen Z;

- ✓ Pelaporan dan Audit Dana Kampanye secara transparan dan akuntabel
- ✓ Penerapan Teknologi Informasi;
- ✓ Pencegahan tindak pidana korupsi.



KPU REPUBLIK INDONESIA

AHPS Biro Advokasi Hukum & Penyelesaian Sengketa



Terima Kasih

SEMOGA SEHAT SELALU!

PUBLIC SPEAKING

Presentation Skill & Managing Class

By Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP & CRGP

2023



Opening:

- Opening & Perkenalan
- Tujuan Pelatihan
- Learning Mindset
- Preview Program





Sesi-1

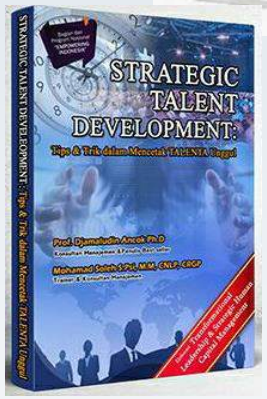


Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP

Master Speaker, Consultant & Assessor

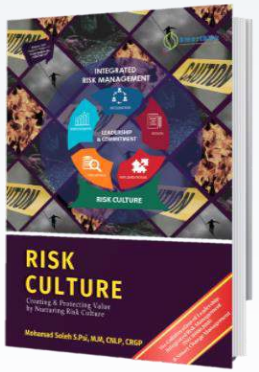


- Managing Director AIDA Consultant
- Senior Consultant : SmartRisk Consultant
- Associate Senior Consultant for Sucofindo, PPA, Nayla
- Consultant for Strategy Management, CbHRM, Reformasi Birokrasi, Project & Risk Management
- Speaker for Self improvement, Teambuilding, Leadership, HR Management
- Project Manager & Coordinator Assessor of Assessment Center
- UNDP Consultant : 2006 – 2008
- Local Consultant : 2005 – 2006
- Prosys Group, Project & Risk Management Consultant company: 2005 – 2006
- Heinz ABC & Local Companies, HR Dept.



Additional Information

✪ As the 2nd rank on Best Student Competition of Kopertis V/ Provinsi DI Yogyakarta
✪ As the 1st rank on Best Student Competition of Islamic University of Indonesia
✪ As the 2nd rank on DI Yogyakarta & National Scientific Writing Competition



- NLP International Certification
- Speaker certified BNSP
- Presenter for National & International Conference
- Speaker on INSPIRATOR program (13 live on TV Cable Program)
- Member of Global Integrated Risk Management Association (GIRMA)
- Client : Ministries & Institutions (Kemenkop UMKM, Kemenag, Kemenkumham, Kemendagri, BSSN, KememBUMN, Kemen ESDM, LPP KUKM, BEI, BI, BPK, BPN, BPKP, BPKS), KPUD, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Babel, Pemprov Aceh, Pemkot Tangerang, Pemkot Serang, BUMN (Timah, Pelindo 1, Biofarma, Taspen Group, Wika, Brantas Abipraya, Asabri, Nindya Karya, AirNav, PLN Group, Pertamina Group, POS, Semen Indonesia Group), International NGO (UNDP, MSF Holland, AusAid, KNCV) and hundreds of other private companies

EXPLORE AND ACTIONABLE INSIGHT TRAINING



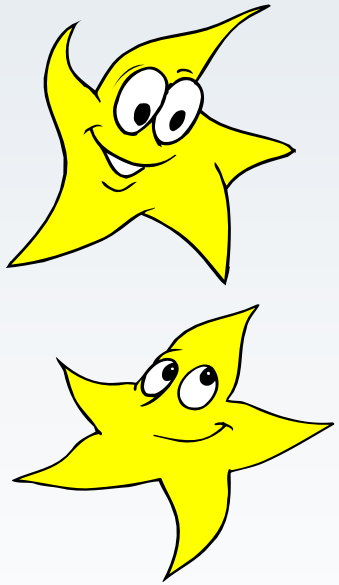






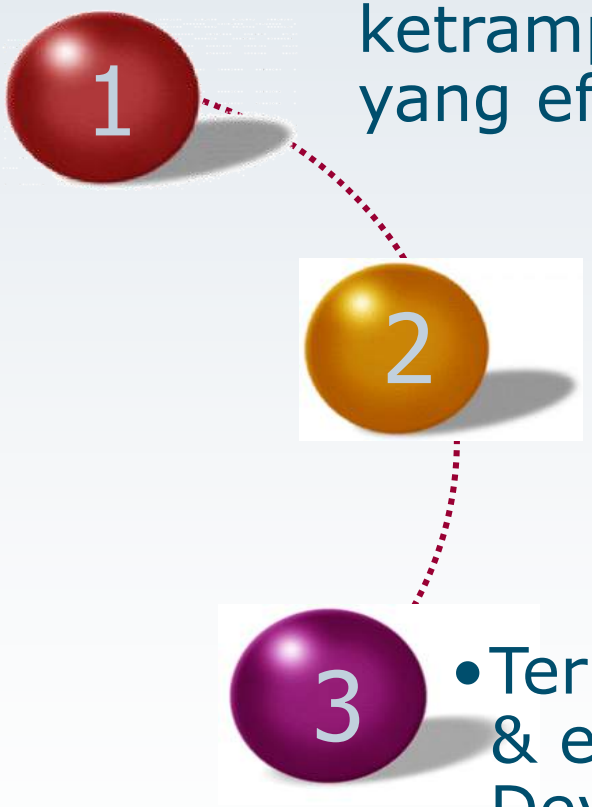
Salam Training





1. Selamat Pagi →Semangat
2. Selamat Siang → Kerja Keras
3. Selamat Sore →GAJIAAAN

Mengapa Kita Belajar Di sini?



- Memahami pengetahuan dan ketrampilan dasar Public Speaking yang efektif
- Mampu menerapkan Ketrampilan dasar dan tips & Trik dalam berperan sebagai Public Speaker
- Terlaksananya Praktek Perkenalan (Latihan & evaluasi) & tersusunnya Individual Development Plan as Public Speaker



Preview Program: Speaker Sukses





Sesi-2

Ciri-ciri Public Speaker Yang Berhasil

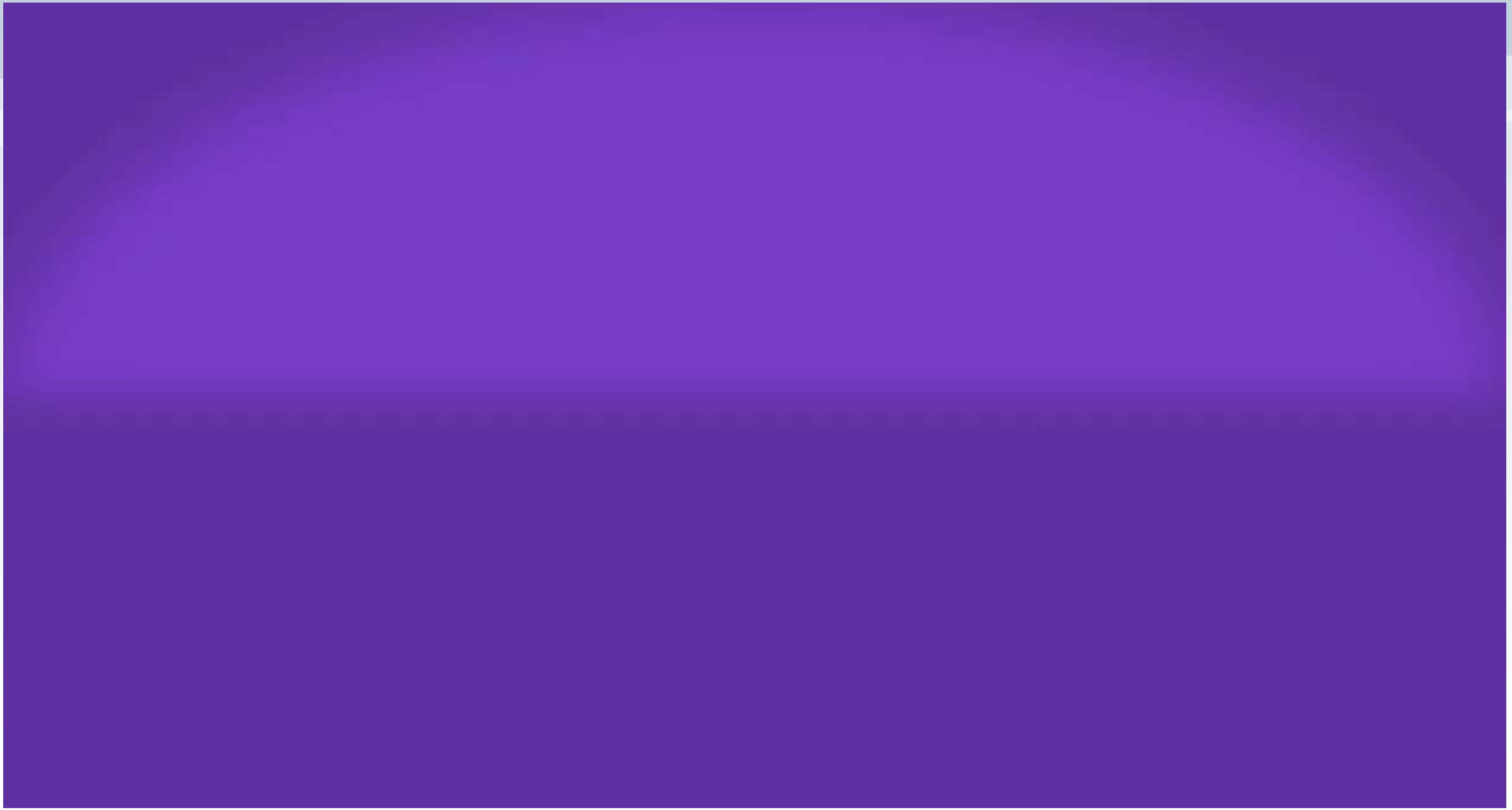


- Penguasaan materi
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....





8



Framework


Communication
Public Speaking
Presentation Skill & Class Management



Metode Pembelajaran Efektif



Hardware Preparation
(Belief system)

Fokus & Yakin bahwa setiap proses dalam Workshop ini akan meningkatkan kemampuan dan hidup anda



Learning Process (Program Installation)

Serap semua informasi tanpa ada keraguan / otokritik, takut, minder, emosional



Implementation Process

(Commissioning /Trial-Error & Evaluation)

Praktek, simulasi, lakukan…lakukan….dan lakukan bersama tim dengan keceriaan


Ada pertanyaan



Teknik Presentasi Sukses:
Penerapan 3V





Sesi-3



- You can not not communication.
- You do not communicate just words, but you are as a whole person.

Teknik Presentasi

Presentasi bukanlah sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga “MENJUAL IDE”

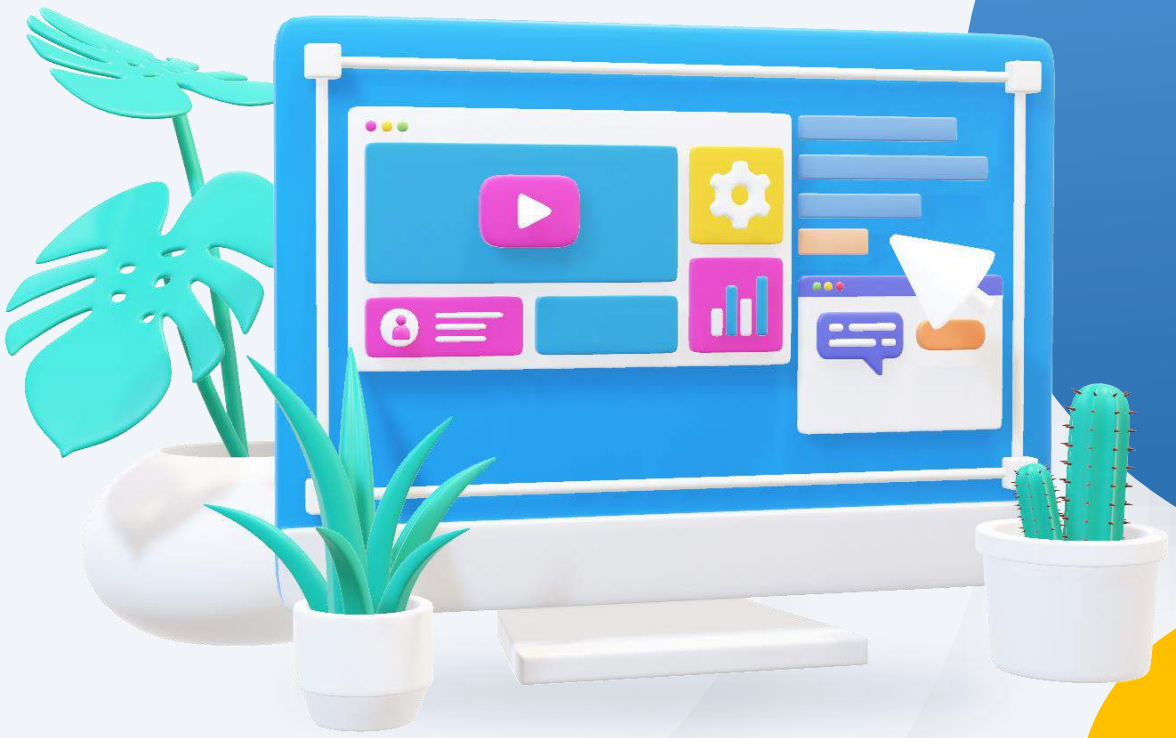
Tolok ukur keberhasilannya adalah idenya **dibeli** atau **tidak**?



- Komunikatif
- Menarik
- Meyakinkan

Rahasia Presentasi Yang sukses

Hasil Riset



55%

Visual

Gambar dan gerakan dalam menjelaskan materi

38%

Vocal

Irama, intonasi, dan cara berkata-kata

7%

Verbal

Kata-kata yang dipakai

Verbal : Apa yang dikatakan



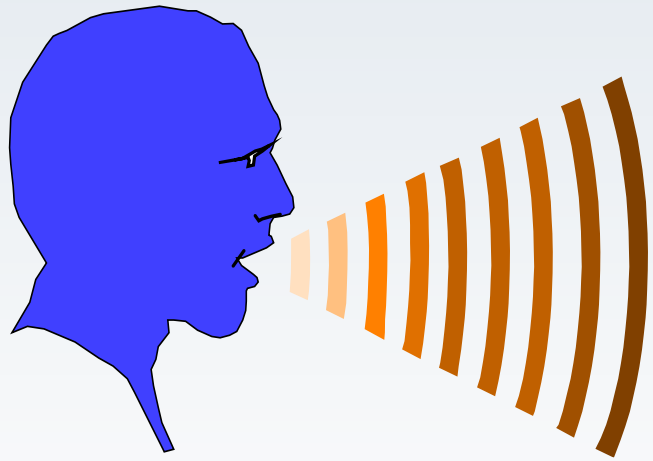
- ✓ Perhatikan penggunaan jargon asing.
- ✓ Presentasikan dalam istilah yang sesuai dengan pengalaman audiens, sehingga menjadi relevan.
- ✓ Persuasi ide dengan membingkainya, bukan mengubah apa yang sudah mereka percayai sebelumnya (Sekaten, Wayang, Nyanyian-gamelan, dll)
- ✓ Orang tidak akan antusias dan tidak akan ingat jika presentasi hanya diberikan dengan data-data.
- ✓ Bingkai data dengan bahasa yang menggambarkan lebih jelas.
- ✓ Riset menunjukkan bahwa audiens lebih mudah menyerap informasi jika dijelaskan dengan bahasa yang lebih menggambarkan (gunakan words picture)

Words Picture



- Menggunakan analogi
  - Kisah
  - Humor
  - Kiasan / metafora
  - Asosiasi
- Menggunakan ilustrasi
  - Statistik yang tidak biasa
  - Besar vs Kecil
  - Warna vs Tidak Warna
  - Sederhana vs Rumit

Vocal : Bagaimana anda mengatakan



Volume

Openness

Intonation

Confidence

Enthusiasm

Speed

Memainkan Intonasi, Nada, Tempo Suara dan Jeda

Untuk tujuan tertentu, seperti menekankan kata-kata yang penting, menumbuhkan perhatian, dan membuat tekanan psikologis, maka Speaker dapat melakukan “perubahan” suaranya dengan cara :

– intonasi me$_{rendah}$
– nada suara yang **berat**
– tempo yang cukup *p e l a n*
– penggunaan jeda



Mengolah Suara

Mis Lalan Menarik



Dinamis: Hidup, naik – turun sesuai topik

Lafal Terang & jelas : pengucapan yang tepat, terutama huruf2 : P, V, F, S, Sy

Lancar : Terkesan tidak seperti membaca

Menyenangkan : akrab, lembut, hangat

Natural : alamiah, jangan tampak dibuat – buat

Tarik nafas secara tepat : jangan terengah-engah

SMILING VOICE





- ✓ Suara yang menampilkan SENYUMAN
- ✓ Suara yang selalu membuat orang lain nyaman & bahagia
- ✓ Suara yang lebih menyehatkan (Peredaran darah di wajah lebih lancar, Tarikan Oksigen lebih banyak, Endorphin, Serotonin & Sel T terproduksi lebih banyak)
- ✓ Senyum = bahasa universal yang artinya saya sedang **senang**, saya **nyaman** ada disini dan akan memancarkan radiasi kehangatan & ramah

Visual : Apa yang dilihat

Body Language

Visual Aids

VISUAL

(Apa yang dilihat)



Visual Aid : Pertimbangan penggunaan alat bantu visual

- Materi / data yang sulit dimengerti
- Menjelaskan daftar / urutan
- Menjelaskan bentuk
- Proses yang rumit
- Banyak materi yang harus diingat
- dll

- Komputer
- Barang bukti / model
- Video
- Proyektor / TV
- Flip Chart
- White Board
- Hand-out
- Pointer Laser
- Dll

Body Language

Pernahkah Anda ?

- ✓ Melihat seseorang dan langsung suka kepadanya …
- ✓ Mendengarkan pembicaraan seseorang dan Anda percaya kepadanya padahal baru kenal…
- ✓ Melihat pembicara yang kata-katanya sangat impresif karena sesuai dengan pembawaannya ?



Pengertian Body Language

- Bagian dari komunikasi yang tidak disadari yang berpengaruh sangat besar pada hasil komunikasi.
- Perlu dipelajari agar dapat dioptimalkan dampaknya sesuai dengan tujuan komunikasi.

  - Kontak Mata
  - Ekspresi Wajah (Alis, senyum, dahi, anggukan kepala, pupil mata).
  - Gerak Tubuh
  - Sosok (Postur)
  - dll

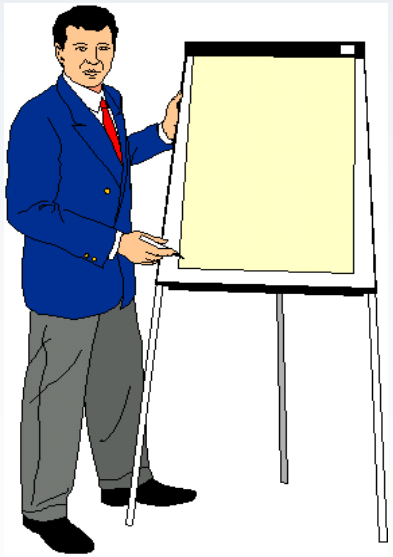


Manfaat mempelajari bahasa tubuh



Mempelajari mengenai bahasa tubuh berguna untuk :

- Memperbaiki penampilan diri
- Memperkuat inti pesan supaya lebih persuasif
- Membangun hubungan baik dengan audiens
- Mengetahui apakah audiens mulai bosan
- Mengetahui kapan harus berganti cara presentasi
- Dan lain-lain



Mengangguk-angguk



- Saat mengatakan sesuatu untuk mempengaruhi, maka usahakan anda sambil mengangguk pada kata-kata yang ingin anda tekankan.
- Kata-kata itu akan punya impresi bahwa hal itu terasa sebagai benar.
- Gunakan juga saat anda mendengarkan Peserta yang sedang berbicara.

Menguasai Gerakan Tangan

- Untuk meningkatkan impresi kata-kata, gerakkanlah tangan mengikuti kata yang anda jelaskan.
- Akan lebih mudah diingat.
- Gerakan tidak perlu terlalu mendetail

Misal:

- Pointing
- Keluar / Di luar
- Lebih bagus / kurang



Menyesuaikan ekspresi muka dengan emosi

Kekuatan kata-kata akan meningkat tajam, jika ekspresi muka disesuaikan dengan kata-kata yang mengandung emosi.

Misal:

- Anak adalah titipan Tuhan yang *sangat indah*
- *Berat sekali* perjuangan ini
- Lakukan dengan penuh *kesabaran*



Posisi Berdiri



- Berdiri tegak & seimbang
- Jangan menutupi papan tulis / screen ketika materi sedang ditampilkan
- Bergerak agar menguasai panggung
- Dekati peserta disaat perlu

Sikap Defensif

- Sikap defensif sering terjadi tanpa disengaja.
- Akan membuat orang lain jadi malas mendengarkan / menyimak presenter
- Memunculkan citra lemah.



Kontak mata



- Menjalin komunikasi timbal balik / audiens merasa dilibatkan
- Presenter ‘tampak’ menguasai situasi
- Menghindari kontak mata akan berkesan tidak percaya diri.
- Jangan memandang eternit, lantai, tembok, white-board, sepatu anda saat sedang berbicara atau sedang mendengarkan peserta
- Saat mendengar pertanyaan lihat penanya, saat menjawab arahkan kontak mata dengan semua audiens
- Lakukan secara merata masing-masing sekitar 3 detik.



Managing Class:

- Formasi Kelas
- *Teknik Bertanya*
- Menangani Peserta Sulit
- Mengendalikan Kecemasan





Sesi-4

6 Pengaturan Ruangan

Options One

Classroom style

Options Two

Modified classroom

Options Three

U-shape



Options Four

Clusters

Options Five

Open circle

Options Six

Boardroom style

PEDOMAN TEKNIK BERTANYA

Hindari pertanyaan yang menyerang

Awali bertanya kpd seluruh Peserta,”tunggu”,lan jutkan dg bertanya kpd salah satu Peserta

Gunakan pertanyaan terbuka ketika pindah materi/ kesimpulan

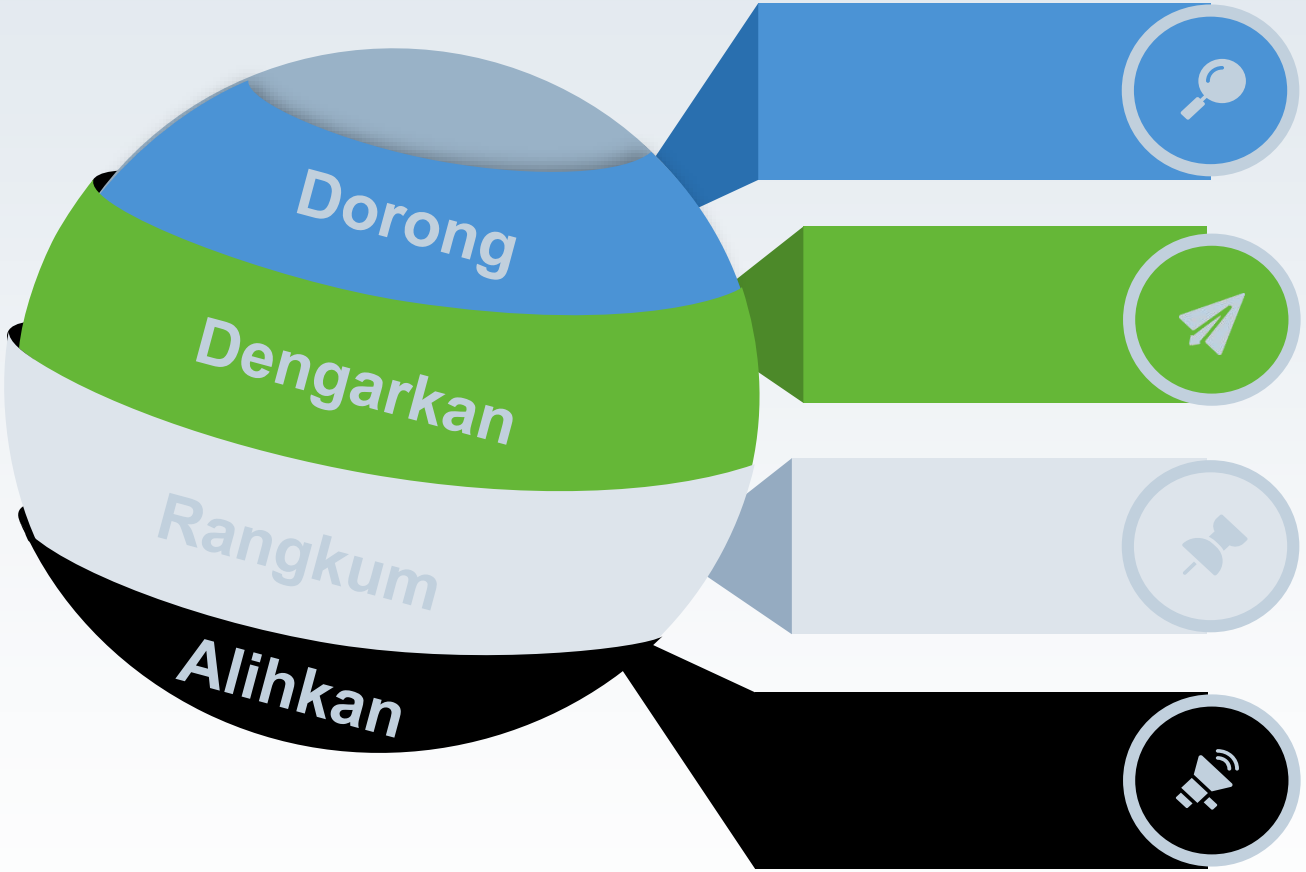
Pertimbangkan sifat, kematangan & karakteristik Peserta

Jika Peserta yang ditunjuk tidak menjawab, tunjuk Peserta lainnya (karena bisa membuat Peserta “down”)



Buatlah daftar pertanyaan terbuka yang bisa Anda ajukan untuk mulai membahas materi

Teknik Menangani Pertanyaan



Dorong Peserta untuk bertanya

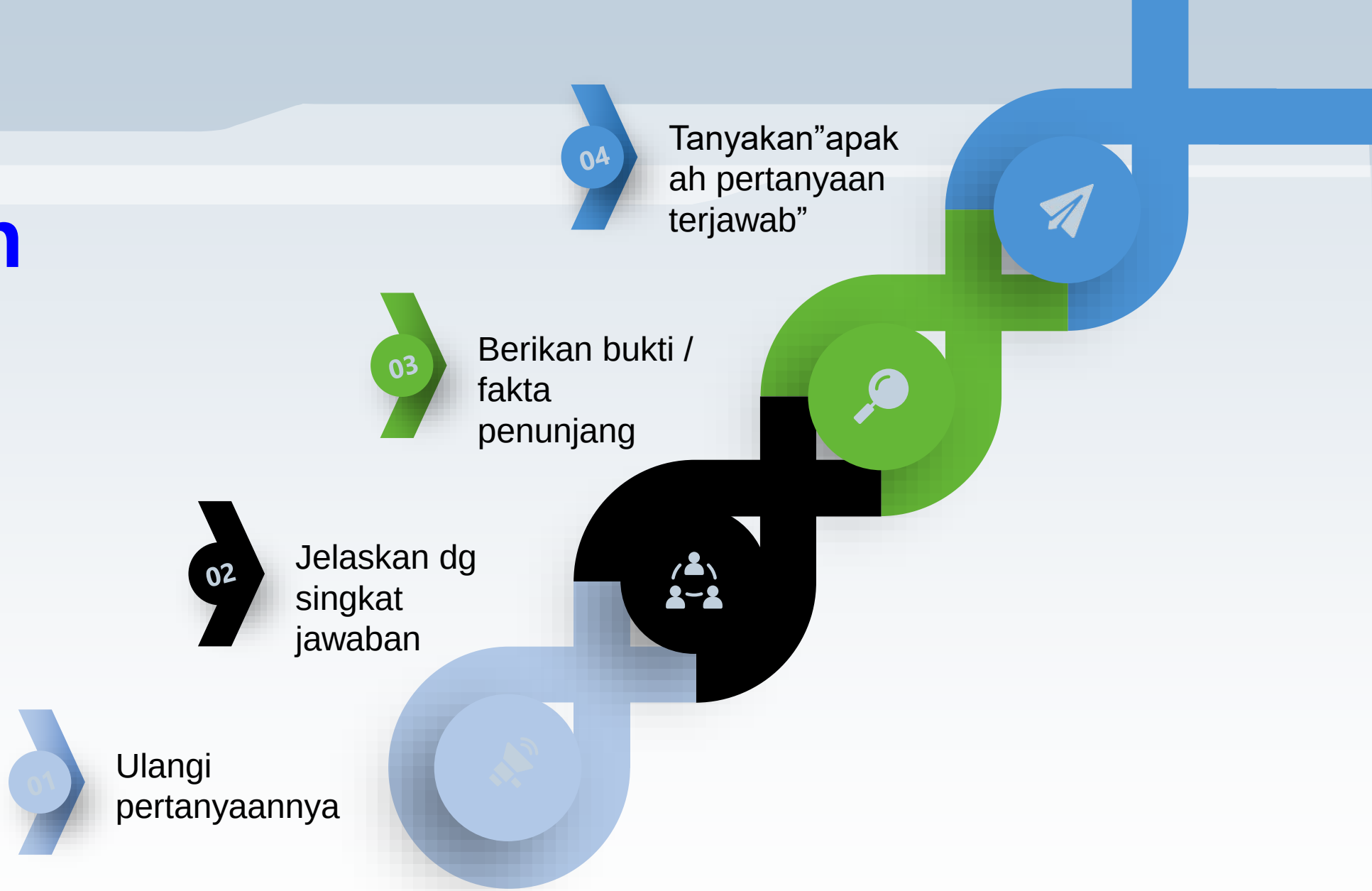
Dengarkan dengan BAIK

RANGKUM, PERJELAS & KONFIRMASI Peserta atas rangkuman tsb

Jika Speaker tidak bisa menjawab, silakan lemparkan ke forum (Peserta lainnya) atau tanya kembali lebih dalam yang dimaksud Peserta tsb



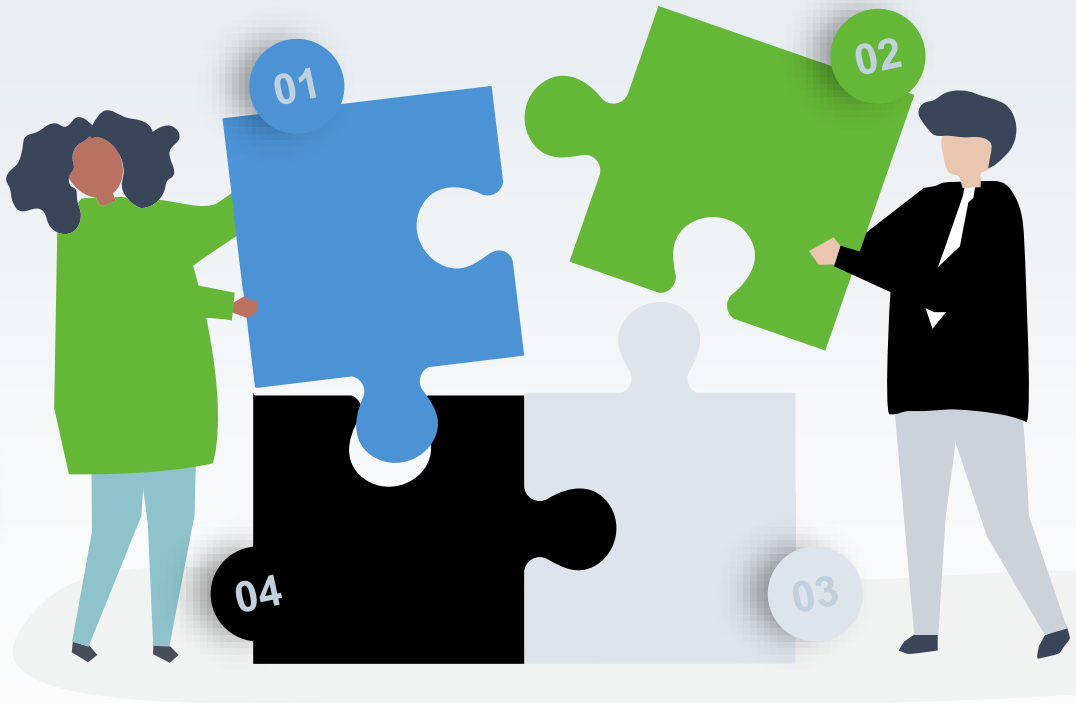
TIPS Menjawab Pertanyaan



4 TRICK mengelola Umpan Balik/RESPON

One
Bentuklah suasana POSITIF (Senyum, sebut namanya)

Two
Jangan memperdebatkan respon dari Peserta



Four
GUNAKAN kata "MENURUT SAYA, PENDAPAT SAYA", jangan katakan "kamu seharusnya,"

Three
Berikan respon yg POSITIF, DETAIL & tidak menyinggung perasaan Peserta

7 TIPs mengelola Umpan Balik / RESPON



Cara-cara untuk Mengatasi Peserta Sulit dg **HATI**

Hindarilah debat kusir

Mulailah dengan ramah-tamah

BerEmpati dengan ide dan keinginan orla

Mulailah dengan hal-hal yang dapat disepakati bersama

Anda salah! Segera akui dengan simpatik

Usahakan agar orang lain berbicara lebih banyak



Dramatisir ide Anda

Buatlah ide datang dari orang lain

Berilah tantangan

Tulus melihat masalah dari kacamata orang lain

Himbaulah pada motif yang mulia & relijius

5 Persiapan Sebelum Mendapat Peserta Sulit

1. Pahami segala sesuatu berkaitan materi Anda dalam perspektif peserta
2. Pahami titik kelemahan Anda sebagai Speaker dalam hal apa saja
3. Pikirkan pertanyaan / sanggahan yang mungkin timbul dari titik lemah tersebut (FAQ)
4. Siapkan jawaban atas pertanyaan atau sanggahan
5. Jawab pertanyaan atau sanggahan sebelum peserta yang SULIT mengajukannya

Mengendalikan kecemasan

- Persiapkan dengan matang,
- Praktekkan
- Siapkan catatan dan alat bantu,
- Bayangkan (gunakan tehnik Ilustrasi dalam SET)
- Coba latihan relaks dan mengatur nafas,
- Minum sedikit air putih untuk mencegah mulut kering,



Mengendalikan kecemasan

- Sebelum mulai, jeda untuk beberapa detik,
- Lakukan kontak pandangan,
- Mulai dengan suara yang keras,
- Bergerak dengan wajar,
- Siapkan catatan jika dibutuhkan
- Gunakan waktu rehat untuk memeriksa catatan, mempelajari catatan untuk sesi berikutnya, mencoba peralatan





Persiapan Praktek Perkenalan





Sesi:5

Persiapan Praktek

1. Berpasangan
2. Menyapa & Perkenalan diri yg Meyakinkan
3. 5 menit
4. Siapkan alat bantu/alat peraga yg diperlukan (slide/flipchart, benda peraga, gambar).
5. Gunakan Kreatifitas anda
6. Evaluasi & Saran







Improvement Plan :

- *Organization Improvement Plan*
- *Individual improvement Plan*





Sesi-6

Smart Learning Process



Pre Development Program :

e-Assessment

Test A for **Staf**
https://bit.ly/testipeA

Test A & B for **Leader**
https://bit.ly/testipeA

https://bit.ly/testipeb

Collecting Data Problem

Training online & offline (practices, simulation, refining discussion)

Project Assignment (Individual Development plan & Problem Solving execution)

Online & Offline Coaching-Mentoring

Post Development Program :

Assessment : Problem solving execution reporting, & Individual reporting

Organization Development Plan

No	Program	Due date	PIC
1	Adakan event briefing teknik memberikan instruksi yg detail kepada peserta bimbingan teknis		
2			
3			
4			
5			

Individual Development Plan

Individual Development Plan :

Every Peserta has an action plan after training to get more result (behavior, process quality, performance)



RENCANA TINDAKAN & EVALUASI TRAINING

Nama / NIK	
Judul Training	
Tanggal Training	

No.	Special Assignment	Tanggal Pelaksanaan		Hasil Pencapaian
		Mulai	Selesai	
1.				
2.				
3.				

No.	Penilaian	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai	Keterangan :
1.		4			Nilai (1) : Tidak Sesuai Harapan
2.		3			Nilai (2) : Sesuai Harapan
3.		3			Nilai (3) : Melebihi Harapan
			Total Akhir		Total Akhir > 15 = Hasil Training EFEKTIF
			Hasil Training	**Efektif / Tidak Efektif**	(coret salah satu)

Peserta	Atasan/Pembimbing	Coach	Catatan/Rekomendasi
Tanggal Penilaian			

Terima Kasih

Nomor : 131/DK.06.00/01/2023 19 Januari 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Kegiatan
Trainers Convention

Kepada Yth.
Pegawai Mahkamah Konstitusi
(Daftar Nama Terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengikuti kegiatan ***Trainers Convention***, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Januari 2023
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai (*jadwal terlampir*)
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall
Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kec. Bogor Tengah
Kota Bogor, Jawa Barat

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:
1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Kepala Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Perpustakaan;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Digital Signature
mk928713532230119031731

Lampiran I
Nomor : 131/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

DAFTAR PESERTA
TRAINERS CONVENTION

A. Kepaniteraan

1	Muhidin	12	Achmad Edi Subiyanto
2	Triyono Edy Budhiarto	13	Wilma Silalahi
3	Wiryanto	14	Ery Satria Pamungkas
4	Ida Ria Tambunan	15	Yunita Rhamadani
5	Saiful Anwar	16	Anak Agung Dian Onita
6	Rizki Amalia	17	Dian Chusnul Chatimah
7	Syukri Asy'ari	18	Fransisca
8	Dewi Nurul Savitri	19	Nurlidya Stephanny Hikmah
9	Hani Adhani	20	Jefri Porkonanta Tarigan
10	Mardian Wibowo	21	Rahadian Prima Nugraha
11	Ria Indriyani	22	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

B. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

23	Pan Mohamad Faiz Kusuma W.	35	Mohammad Mahrus Ali
24	Bisariyadi	36	Mery Christian Putri
25	Anna Triningsih	37	Zaka Firma Aditya
26	Oly Viana Agustine	38	Andriani Wahyuningtyas Novitasari
27	Nallom Kurniawan	39	Ananthia Ayu Devitasari
28	Irfan Nur Rachman	40	M. Lutfi Chakim
29	Luthfi Widagdo Eddyono	41	Rizkisyabana Yulistyaputri
30	Abdul Ghoffar	42	Muhammad Reza Winata
31	Winda Wijayanti	43	Intan Permata Putri
32	Helmi Kasim	44	Abdul Basid Fuadi
33	Titis Anindyajati	45	Rima Yuwana Yustikaningrum

34 Alboin Pasaribu

46 Erlina Maria Christin Sinaga

C. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

47 Syamsudin Noer

48 Supriyanto

49 Siska Yosephin Sirait

50 Achmad Dodi Haryadi

51 Siswantana Putri Rachmatika

52 Indah Karmadaniah

53 Suryo Gilang Romadlon

54 Agusniwan Etra

55 Yunita Nurwulantari

56 Rio Tri Juli Putranto

57 Fenny Tri Purnamasari

58 Rahmadiani Putri Nilasari

59 Haifa Arief Lubis

60 Hersinta Setiarini

61 Nuzul Qur'aini Mardiya

62 Lia Nur Jannah

63 Muhammad Ramlan Aminuddin

64 Paulus Rudy Calvin Sinaga

65 Muhammad Doni Ramdani

D. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

66 Fajar Laksono

67 Adinda Rizky Putri Chaerunissa

E. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

68 Sigit Purnomo

69 Nanda Adytiansyah

70 Riska Aprian

71 Sri Haryanti

72 Widy Hastowahyudi

73 Mazmur Alexander Manik

74 Taufik Gunanda

75 Tarnoto

76 Nur Rakhman

77 Jeklin Indriani Br Purba

78 Adam Ghuzalee Ramadhan

79 Muhamad Aussie

80 Muhammad Ridho Ihsan

81 Nahar Slamet

82 Agung Wisnu Laksono

83 Muhammad Radhi Zhafari

84 Indra Pandu Wibowo Purwanto

85 Bobi Arianto

86 Ishak Purnama

87 Rudi Kurniawan

88 Rachman Karim

89 Jamaludin Salam

90 Hafidz Ikhsan Baihaki

91 Aria Yudha

92 Lesmana Ramadon

93 Jefriyanto

F. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

94 Imam Margono
95 Nanang Subekti
96 Ardiansyah Salim
97 Santhy Kustrihardiani
98 Bambang Sukmadi
99 Melati Kusuma Wardani
100 Hadian Taofik Rahman
101 Yahya Amarullah Taufik
102 Muhlis Nova
103 Bangkit Panji Anarogo
104 Chafid Sugianto
105 Edwin Rivano
106 Fazlur Rahman El Islamy
107 Angga Putri Gardina
108 Edwin Aditya Irawan
109 M. Hairuddin

G. Biro Perencanaan dan Keuangan

110 Tatang Garjito
111 Endrizal
112 Budi Hari Wibowo
113 Romi Sundara
114 Chandra Okantara
115 Isti Widayanti
116 Maria Ulfah Kusumaastuti
117 Yuni Nurhayati
118 Andi Aprilla Megananda Sanusi
119 Sarah
120 Renando Piany Fazardo

H. Inspektorat

121 Kurniasih Panti Rahayu
122 Dian Dwi Hapsoro
123 Wijang Ardi Rahmadi

I. Kementerian PPN/Bappenas

Lampiran II
Nomor : 131/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN *TRAINERS CONVENTION*

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Rabu, 25 Januari 2023	14.00 – 15.00 WIB	**Registrasi Peserta dan *Check in***	Penyelenggara	Grand Ballroom Lantai PL
	15.00 – 15.30 WIB	Istirahat		
	15.30 – 16.30 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Plt. Sekretaris Jenderal**	Grand Ballroom Lantai PL
	16.30 – 18.00 WIB	**Sesi I :** **Arahan dan Kebijakan Ketua MK terkait Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024**	**Ketua MK**	Grand Ballroom Lantai PL
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	

	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi II:** **Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD Tahun 2024** **Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Tahun 2024**	Narasumber: **1. YM Dr. Suhartoyo** **2. YM Prof. Saldi Isra** Moderator: **Pan M. Faiz**	Grand Ballroom Lantai PL
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Kamis, **26 Januari 2023**	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan		Restoran Lantai PL
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi III:** **Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024**	Narasumber: **1. KPU** **2. Bawaslu** Moderator: **Nanang Subekti**	Grand Ballroom Lantai PL
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi IV:** ***Public Speaking***		Grand Ballroom Lantai PL
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi V:** **Penyampaian Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi** Moderator: **Ardiansyah Salim**	Grand Ballroom Lantai PL

	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*		
	16.00 – 18.00 WIB	**Sesi VI:** **Diskusi Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi** Moderator: **Ardiansyah Salim**	Grand Ballroom Lantai PL
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi VII:** **Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**	Narasumber: **1. YM Prof. Arief Hidayat** **2. YM Prof. Enny Nurbaningsih** **3. YM Prof. M. Guntur Hamzah** Moderator: **PM II - Dr. Wiryanto**	Grand Ballroom Lantai PL
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Jumat, 27 Januari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Sarapan		Restoran Lantai PL
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi VIII:** **Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **1. Panitera** **2. Plt. Sekretaris Jenderal** Moderator: **PM I - Triyono Edy**	Grand Ballroom Lantai PL
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		

	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi IX:** **Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek**	Narasumber: **1. Mardian Wibowo** **2. Syukri Asy'ari** **3. M. Mahrus Ali** **4. Bisariyadi**	Grand Ballroom Lantai PL
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi X:** **Lanjutan Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek**	Narasumber: **1. Mardian Wibowo** **2. Syukri Asy'ari** **3. M. Mahrus Ali** **4. Bisariyadi**	Grand Ballroom Lantai PL
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*		
	16.00 – 17.00 WIB	**Sesi XI:** **Lanjutan Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek**	Narasumber: **1. Mardian Wibowo** **2. Syukri Asy'ari** **3. M. Mahrus Ali** **4. Bisariyadi**	Grand Ballroom Lantai PL
	17.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Sabtu, **28 Januari 2023**	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan		

	08.00 – 10.00 WIB	**Penutupan** 1. Laporan Plt. Kapusdik 2. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Doa	**Plt. Sekretaris Jenderal** **Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi**	Grand Ballroom Lantai PL
	10.00 – 12.00 WIB	***Check out***		

Nomor : 135/DK.06.00/01/2023 19 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 26 Januari 2023
Waktu	:	19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat	:	Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi	:	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk735107244230119033522

Lampiran I
Nomor : 135/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	**Narasumber:** – YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. – YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. – YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

Nomor : 140/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan 1 (satu) orang pejabat Komisi Pemilihan Umum RI untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 26 Januari 2023
Waktu	:	07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Grand Ballroom, Lantai PL Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi	:	Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk359039427230119035406

Lampiran I
Nomor : 140/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	07.30 – 09.30	**Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024**	**Narasumber:** KPU & Bawaslu
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*	Penyelenggara

NO	MATERI	NARASUMBER	DURASI
1.	• Evaluasi Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 • Sistem Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 • Tantangan Pemilu Tahun 2024	Narasumber: KPU	45 MENIT
2.	• Sistem Pengawasan Pemilu Tahun 2024 • Indeks Kerawanan Pemilu • Tantangan Pemilu Tahun 2024	Narasumber: Bawaslu	45 MENIT

Nomor : 141/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Rahmat Bagja, S.H., LL.M
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan 1 (satu) orang pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-211253087323011903570 3

Lampiran I
Nomor : 141/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	07.30 – 09.30	**Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024**	**Narasumber:** KPU & Bawaslu
	09.30 – 10.00	*Coffee Break*	Penyelenggara

NO	MATERI	NARASUMBER	DURASI
1.	• Evaluasi Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 • Sistem Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 • Tantangan Pemilu Tahun 2024	Narasumber: KPU	45 MENIT
2.	• Sistem Pengawasan Pemilu Tahun 2024 • Indeks Kerawanan Pemilu • Tantangan Pemilu Tahun 2024	Narasumber: Bawaslu	45 MENIT

Nomor : 142/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
Panitera Mahkamah Konstitusi
Bapak Muhidin
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Jumat, 27 Januari 2023
Waktu	:	09.45 – 11.45 WIB
Tempat	:	Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi	:	Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk776196494230120110818

Lampiran I
Nomor : 142/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	09.45 – 11.45	Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU	**Narasumber:** –Panitera MK –Plt Sekretaris Jenderal MK

Nomor : 143/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 09.45 – 11.45 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk381193330230120110720

Lampiran I
Nomor : 143/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	09.45 – 11.45	Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU	**Narasumber:** –Panitera MK –Plt Sekretaris Jenderal MK

Nomor : 145/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan ***Trainers Convention*** dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 24 Januari 2023
Waktu	:	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Grha Konstitusi 2 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Agenda	:	Rapat Persiapan Kegiatan *Trainers Convention*

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-829299190230120113852

Nomor : 147/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Jumat, 27 Januari 2023
Waktu	:	07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi	:	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk59824936230120085552

Lampiran I
Nomor : 147/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	07.30 – 09.30	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD	**Narasumber:** – YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA – YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum – YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Nomor : 148/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Jumat, 27 Januari 2023
Waktu	:	07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi	:	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk136360758023012008541 4

Lampiran I
Nomor : 148/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	07.30 – 09.30	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD	**Narasumber:** – YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA – YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum – YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Nomor : 149/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-208919655230120085202

Lampiran I
Nomor : 149/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	07.30 – 09.30	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD	**Narasumber:** – YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA – YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum – YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Nomor : 151/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 25 Januari 2023
Waktu	:	19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat	:	Grand Ballroom, Lantai PL Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi	:	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk180193697723012008493l

Lampiran I
Nomor : 151/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Rabu, 25 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD	**Narasumber:** YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Nomor : 152/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk186454973723012008472 7

Lampiran I
Nomor : 152/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Rabu, 25 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD	**Narasumber:** YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Nomor : 153/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 26 Januari 2023
Waktu	:	19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat	:	Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi	:	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk113625234823011903475 9

Lampiran I
Nomor : 153/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	**Narasumber:** – YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. – YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. – YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Nomor : 154/DK.06.00/01/2023 20 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 26 Januari 2023
Waktu	:	19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat	:	Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi	:	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk971094390230119034602

Lampiran I
Nomor : 154/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	**Narasumber:** – YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. – YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. – YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

Nomor : 155/DK.06.00/01/2023 24 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Laporan Pembukaan**

Kepada,
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menyampaikan laporan dalam pembukaan kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Waktu : 15.30 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Digital Signature
mk1040552424230120041555

Lampiran I
Nomor : 155/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 24 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall

HARI	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
Rabu, 25 Januari 2023	15.30 – 16.30	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	- YM Ketua MK - Plt. Sekjen

Nomor : 155/DK.06.00/01/2023 24 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan Penutupan**

Kepada,
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menyampaikan sambutan dan menutup kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Digital Signature
mk104055242423012004164 6

Lampiran I
Nomor : 155/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 24 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall

HARI	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
Sabtu, 28 Januari 2023	08.00 – 10.00	**Penutupan** 1. Laporan Plt. Kapusdik 2. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Doa	- Plt. Sekretaris Jenderal - Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi

Nomor : 163/DK.06.00/01/2023 25 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
Managing Director AIDA Consultant
Bapak Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak dan tim untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : *Public Speaking*

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk133576411723012511 3632

Lampiran I
Nomor : 163/DK.06.00/01/2023
Tanggal : 25 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	10.00 – 12.00	*Public Speaking*	Tim PT. AIDA Infini Maksima

Nomor : 188/DK.00/01/2023 10 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat Persiapan TC**

Pegawai Mahkamah Konstitusi
(Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun konsep kegiatan *trainers convention* yang rencanannya akan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 29 Januari 2023. Kegiatan *trainers convention* bertujuan untuk memberikan panduan kepada para calon narsumber dan fasilitator pada saat memberikan materi pada Bimtek PHPU. Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Sauadara/I untuk menghadiri rapat koordinasi pembahasan persiapan kegiatan *trainers convention* yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 12 s.d. 13 Januari 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Agenda : Pembahasan Persiapan *Trainers Convention*
Tempat : Grha Konstitusi III
Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :
Yth. Bapak Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-991911253230110080734

Lampiran Surat
Nomor : 188/DK.00/01/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

Daftar Peserta Rapat

1. Muhidin
2. Triyono Edy Budhiarto
3. Wiryanto
4. Ida Ria Tambunan
5. Imam Margono
6. Nanang Subekti
7. Syukri Asyari
8. Saiful Anwar
9. Rizki Amalia
10. Mardian Wibowo
11. Achmad Edi Subiyanto
12. Bisariyadi
13. Pan M. Faiz
14. M. Mahrus Ali
15. Ardiansyah Salim
16. Santhy Kustrihardiani
17. Wilma Silalahi
18. Bambang Sukmadi
19. Melati Kusuma Wardani
20. Nanda Adityansyah
21. Muhlis Nova
22. Yahya Amarullah Taufik
23. Hadian Taofik Rahman
24. Bangkit Panji Anarogo
25. Chafid Sugianto
26. Edwin Rivano
27. Fazlur Rahman El Islamy
28. Suhardi
29. Angga Putri Gardina
30. Edwin Aditya
31. Achmad Dodi Haryadi
32. Muhammad Ramlan
33. Adinda Rizky Putri
34. Tarnoto
35. Jeklin Indriani
36. Ishak Purnama
37. Rudi Kurniawan

SURAT TUGAS
42/2000/01/2023

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan *Trainers Convention* Bimbingan Teknis Pemilihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya narasumber dalam kegiatan tersebut;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf ***a.***

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

Kepada : **Nama Terlampir**
Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention* Bimbingan Teknis Pemilihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Hari/tanggal : Rabu s.d. Sabtu/ 25 s.d. 28 Januari 2023
Waktu : **Jadwal Terlampir**
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 24 Januari 2023

a.n. Ketua

Plt. Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Digital Signature
mk-423261528230130111749

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 42/2000/01/2023
Tanggal: 24 Januari 2023

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	25 Januari 2023
2	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Narasumber	26 Januari 2023
3	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	25 Januari 2023
4	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.	Narasumber	25 Januari 2023
5	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	26 Januari 2023
6	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H	Narasumber	27 Januari 2023
7	Totok Hariyono, S.H.	Narasumber	26 Januari 2023
8	Andi Krisna, S.Sos., M.M.	Narasumber	26 Januari 2023
9	Mushaddiq Amir	Narasumber	27 Januari 2023